YOGYAKARTA SMART CITY COMMUNITY EMPOWERMENT AND STRENGTHENING

Penulis

Oktiva Anggraini, Bela Novia Astuti, Arisona dkk.

jejakpustaka

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

LINGKUP HAK CIPTA

Pasal 1

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETENTUAN PIDANA

Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (l) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

YOGYAKARTA SMART CITY COMMUNITY EMPOWERMENT AND STRENGTHENING

Penulis

Oktiva Anggraini, Bela Novia Astuti, Arisona dkk.

jejakpustaka

YOGYAKARTA SMART CITY
COMMUNITY EMPOWERMENT AND STRENGTHENING

Penulis:
Oktiva Anggraini, Maria Andrayani Bolin, Imaculata Kewa Are, Mia Audina Ismail, Venti Anggraini, Daniel Arkalaus Mailani, Bela Novia Astuti, Nugroho Dwisatria Semesta, Nia Ambarwati, Apriliyani, Ananda Fikri Sulistyo, Nabila Syaidatun Rahmawati, Ari Sona, Muhammad Sabri Ahmad, Natasya, Muhammad Fajar, Anastasia Hartini Hadia, Elam Dan Wenda, Mersiana Dali, Natalia Betty Goo, Yemima Dikta Stefany, Alif Aswan Prathama Putra, Ardilah Abdullah, Menaus Wasiangge, Urmila Putri Yanda, Nurul Safika Kasmin, Ramlya Ishak, Intan Ayu Fitria, Roifatul Karomah, Agus Krepmbo, Martina Lefumonay, Pramesti Amaliyah, Fransiskus Dicaprio Saptro, Aldy Irawan, Amirudin Abdulla, Fikram Ilyas Mahing, Arifal Mansur.

All rights reserved
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Hak Penerbitan pada Jejak Pustaka
ISBN: 978-623-183-099-9

Penyelia Aksara:
Nilnasari Nur Azizah
Tata Letak Isi:
Imarafsah Mutianingtyas
Desain Cover:
Bayu Aji S

viii + 104 hlm: 15,5 x 23 cm
Cetakan Pertama, Februari 2023

Penerbit
Jejak Pustaka
Anggota IKAPI No. 141/DIY/2021
Sekretariat Jejak Imaji, RT 04 Kepuhkulon, Wirokerten
Banguntapan Bantul Yogyakarta
jejakpustaka@gmail.com
081320748380

KATA PENGANTAR

Rasa syukur dan segala puji atas karunia dan nikmat yang diberikan Allah Swt. kepada tim penulis sehingga karya buku ini dapat selesai.

Dinamika kehidupan sosial di perkotaan yang semakin tinggi menumbuhkan harapan warga yang semakin meningkat, sementara sisi lain menunjukkan bahwa pemerintah kota memiliki keterbatasan staf, keuangan, dan infrastruktur. Ketika dihadapkan pada realitas tersebut, jawaban yang tepat untuk menangani permasalahan tersebut adalah dengan menerapkan konsep *Smart City*. Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam menerapkan konsep *Smart City.* Dari sisi pemerintah, aparat birokrasi masih banyak yang memiliki keterbatasan dalam hal pengetahuan maupun implementasi TIK (teknologi, informasi dan komunikasi) sehingga perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah selaku *leading sector* penerapan konsep *Smart City* pada masyarakat. Dari sisi anggaran, penerapan konsep *Smart City* tidak dapat hanya mengandalkan anggaran pembelanjaan daerah. Oleh karena itu, pentingnya mencari investor dan melibatkan swasta. Pemerintah sebagai katalis pembangunan berperan penting dalam menginformasikan kebutuhan kota sehingga akan tercapai tujuan dari *Smart City*.

Dari sisi masyarakat, perlunya peningkatan literasi terkait dengan konsep *Smart City* sehingga masyarakat lebih teredukasi. Kota yang cerdas dimulai dari warga yang cerdas pula. Tingkat melek teknologi Kota Yogyakarta sudah cukup baik, literasi internet cukup baik, tetapi kebiasaan menggunakan teknologi untuk layanan publik masih perlu ditingkatkan. Proses Yogyakarta *Smart City* dalam menguatkan pemberdayaan masyarakat mengatasi persoalan pembangunan menarik untuk ditelaah. Buku ini, mengetengahkan hal tersebut bersama sederet penulis muda yang melakukan mini riset di sejumlah kemantren di Kota Yogyakarta.

Hasil pengamatan dan kajiannya dituangkan dalam bentuk tulisan terkait inovasi-inovasi pemerintah Kota Yogyakarta dalam berproses menciptakan *smart governance* dan *smart society* sebagai prasyarat *Smart City.* Buku ini diharapkan dapat menjadi inspirasi tumbuhnya inovasi-inovasi pelayanan publik yang mampu mendekatkan dengan ekspektasi publik. Selain itu, diharapkan buku ini dapat memperkaya pengetahuan dan menjadi referensi bagi pemerhati *Smart City*.

Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu kelancaran penulisan karya ini yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Dengan rendah hati kami menyadari bahwa rangkaian artikel ini kurang sempurna, oleh karenanya terbuka saran dan kritik yang membangun.

Hormat kami
Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **v**
DAFTAR ISI ..... **vii**

YOGYAKARTA *SMART CITY* DALAM *EMPOWERING* MASYARAKAT
Oktiva Anggraini 1

GERAKAN KAMPUNG PANCA TERTIB GUNA MENUNJANG KETERTIBAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KOTA YOGYAKARTA
Maria Andrayani Bolin, Imaculata Kewa Are,
Mia Audina Ismail, Venti Anggraini, Daniel Arkalaus Mailani 22

INOVASI KAMPUNG SAYUR KOTA YOGYAKARTA
Bela Novia Astuti, Nugroho Dwisatria Semesta,
Nia Ambarwati, Apriliyani, dan Ananda Fikri Sulistyo 34

JOGJA *SMART SERVICE* (JSS) PENUNJANG PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI YOGYAKARTA
Nabila Syaidatun Rahmawati, Ari Sona,
Muhammad Sabri Ahmad, Natasya, Muhammad Fajar 52

KELURAHAN TERBAN JUARA INOVASI DI DIY
Anastasia Hartini Hadia, Elam Dan Wenda, Mersiana Dali,
Natalia Betty Goo, Yemima Dikta Stefany 59

PENGELOLAAN WISATA HALAL KAMPUNG KAUMAN YOGYAKARTA
Alif Aswan Prathama Putra, Ardilah Abdullah,
Menaus Wasiangge, Urmila Putri Yanda, Nurul Safika Kasmin,
Ramlya Ishak.....70

NOSTALGIA TOUR DE KOTABARU DI YOGYAKARTA: UPAYA MENAMBAH KECINTAAN TERHADAP CAGAR BUDAYA
Intan Ayu Fitria, Roifatul Karomah, Agus Krepmbo,
Martina Lefumonay, Pramesti Amaliyah.....80

RUMAH KOMPOS: MODEL PENGELOLAAN SAMPAH BERKELANJUTAN DI YOGYAKARTA
Fransiskus Dicaprio Saptro, Aldy Irawan, Amirudin Abdulla,
Fikram Ilyas Mahing, Arifal Mansur 90

YOGYAKARTA *SMART CITY* DALAM *EMPOWERING* MASYARAKAT

Oktiva Anggraini

Perkembangan Kota

Kemajuan dan perkembangan kota di berbagai negara di dunia ini menjadi magnet bagi masyarakat dan mendorong terjadinya urbanisasi (Sengers et al., 2018). Minimnya lahan pekerjaan, upah yang rendah di perdesaan, kenyamanan suasana perkotaan, dan arus hedonisme yang mengglobal menjadikan kota merupakan pilihan yang lebih menarik bagi pencari kerja. Permasalahan yang muncul, yaitu permukiman kumuh, kemacetan lalu lintas, serta peningkatan permasalahan ekonomi; sosial; dan lingkungan di wilayah perkotaan menjadi masalah berikutnya yang terjadi di kota-kota besar dunia

Kondisi yang kurang lebih serupa terjadi di Indonesia yang dinilai sebagai negara dengan tingkat pertumbuhan urbanisasi tertinggi di dunia. Data proyeksi penduduk BPS menunjukkan pada tahun 2020 sebanyak 56,7% penduduk Indonesia tinggal di wilayah perkotaan dan diprediksi jumlahnya akan semakin meningkat menjadi 66,5% di tahun 2035. Bank Dunia juga memperkirakan di tahun 2045 sebanyak 220 juta orang atau 70% dari penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan (BPS, 2020).

Sederet persoalan perkotaan tersebut menimbulkan pendekatan-pendekatan pemecahan masalah. Konsep kota cerdas atau *Smart City* dapat menjadi salah satu pendekatan yang *fashionable* dalam pengembangan kota untuk mengatasi berbagai permasalahan (Borsekova, 2018). Awalnya, konsep ini muncul sebagai respons terhadap tantangan urbanisasi di abad ke-21 (Praharaj & Han, 2018). Sebelumnya, perkembangan penggunaan teknologi internet cukup pesat dalam memantau masyarakat dunia menyelesaikan tugas dan kebutuhan masyarakat. Sejak hadir di tahun 1960, internet bahkan membuat pelayanan masyarakat

menjadi mudah. Dengan adanya internet, arus informasi dapat diakses melalui situs yang disediakan pemerintah (Allwinkle, Cruickshank, 2011). Pada periode selanjutnya di tahun 2000-an, pengguna internet semakin dimanjakan karena melimpahnya data dan proses akses yang *real time*. Dengan cara ini, memudahkan pengguna berkomunikasi dengan dua arah.

Tumbuhnya *Smart City,* menurut para ahli juga untuk merespons industri dasar di masa depan. Industri yang menciptakan kota pintar tumbuh secara dramatis. Semua negara mengharapkan industri terkait kota pintar akan menggantikan industri yang sudah ada dengan industri yang semakin matang dan bahkan melakukan ekspansi ke luar negeri (Choi, 2020). Mata dunia semakin serius memandang eksistensi *Smart City*, ketika PBB meluncurkan inisiatif *United for Smart Sustainable Cities* (USSC) tahun 2016. Upaya ini untuk mendukung SDGs, khususnya SDG11. Dikoordinasikan oleh *International Telecomunication Union (ITU),* Komisi Ekonomi PBB untuk Eropa UNECE, dan UN-Habitat. Mereka menyepakati pentingnya advokasi kebijakan publik dan penggunaan informasi serta ICT untuk memfasilitasi dan memudahkan transisi menuju *smart sustainable city.*

Berbicara tentang *Smart City,* merupakan sebuah langkah inovatif yang diciptakan untuk mengatasi persoalan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan komunitas setempat. Konsep S*mart City* ditujukan untuk merencanakan dan membangun distrik kota yang cerdas di mana teknologi terintegrasi dalam infrastruktur dan digunakan untuk mengendalikan dan mengatur fungsi-fungsi kota dengan inovatif (Praharaj & Han, 2019).

Sebagai kota budaya dan pelajar, Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota berpotensi di tanah air untuk menerapkan konsep *Smart City* tersebut. Modal dasar yang dimiliki oleh Kota Yogyakarta seperti modal budaya, modal sosial, dan modal tata kelola pemerintahan yang cukup baik mampu untuk menumbuhkan strategi dan implementasi *Smart City* yang dicanangkan pemerintah secara nasional sejak tahun 2018.

Orientasi dasar pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik menjadi tantangan tersendiri untuk mewujudkannya. Khususnya terkait mengemas model pelayanan publik yang sedekat mungkin dengan ekspektasi masyarakat dan dapat memberikan nilai tambah dalam wujud tahapan proses yang sederhana, terukur, murah, dan transparan. Terlebih lagi, pemahaman penduduk Kota Yogyakarta rata-rata cukup baik dan kesadaran akan hak publik tinggi. Tingkat *handarbeni* atau kecintaan pada kotanya sebagai bentuk rasa memiliki terhadap kotanya luar biasa. Di samping itu, pemahaman akan prinsip pelayanan publik pemerintahnya demikian jelas menuntut aparat pemerintah Kota Yogyakarta mampu menyajikan kualitas pelayanan yang baik. Kompleksitas yang dihadapi pemerintah Kota Yogyakarta dalam menurunkan angka kemiskinan menjadi fakta berikutnya yang menarik untuk diamati. Seiring penerapan konsep *Smart City* tersebut mampu menurunkan angka kemiskinan. Indikator sasaran pertumbuhan ekonomi meningkat adalah angka pertumbuhan ekonomi. Sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, pertumbuhanekonomi Kota Yogyakarta terus meningkat dengan tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 5,45%. Pandemi Covid-19 yang membuat kunjungan wisatawan menurun drastis memukul sektor pariwisata yang menjadi lokomotif perekonomian Kota Yogyakarta. Menariknya, data terakhir tahun 2021, tingkat capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 163,51 persen. Upaya-upaya yang dilakukan Pemkot Yogyakarta cukup gigih. Selain mampu menekan angka kematian akibat Covid-19, Pemkot Yogyakarta mendorong warganya untuk lebih cepat bangkit dari pandemi melalui berbagai program pemberdayaan. Berdasar latar belakang di atas, menarik untuk diamati implementasi Yogyakarta sebagai kota cerdas dalam menguatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Tulisan ini diawali dengan konsep *Smart City*, manfaat dan tujuan S*mart City*, serta penerapannya di Indonesia sekilas. Selanjutnya, paparan inti berupa penerapan *Smart City* di Yogyakarta dalam pemberdayaan masyarakat.

***Smart City*, Manfaat, dan Tujuannya**

Smart City adalah pengembangan dan pengelolaan kota dengan pemanfaatan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) untuk menghubungkan, memonitor, dan mengendalikan berbagai sumber daya yang ada di dalam kota dengan lebih efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada warganya serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan (Suhono, 2015). *Smart City* merupakan performa kota yang baik dalam enam dimensi (tata kelola, ekonomi, manusia, kehidupannya, lingkungan dan mobilitas yang dibangun dari kombinasi kecerdasan, serta talenta dan aktivitas yang diprakarsai oleh masyarakatnya (Giffinger, 2007).

Smart City juga dapat didefinisikan sebagai sebuah konsep penataan kota yang terintegrasi dalam semua aspek, baik dari pemerintahan, penduduk, kesehatan, pendidikan, dan masih banyak lagi yang lainnya dengan menjadikan perkembangan teknologi sebagai salah satu perangkatnya (Saphiro, 2006). United Nation (2019), mendefinisikan kota cerdas sebagai kota inovatif yang menggunakan TIK dan cara lain untuk meningkatkan kualitas hidup, efisiensi, operasi perkotaan dan layanan, serta daya saing untuk memenuhi kebutuhan sekarang dan generasi mendatang. *Goal Smart City*, yakni mewujudkan kota yang aman dan nyaman ditinggali oleh warganya, memperkuat daya saing kota dalam perekonomian sehingga menunjang dimensi sosial dan ekonomi (daya saing dan lingkungan) (Schiavo, F.T. 2022). Dapat disimpulkan bahwa keberadaan S*mart City* memanfaatkan sumber informasi dan menggunakan teknologi yang canggih untuk mempermudah kehidupan. Dalam berbagai kajian, *Smart City* menjadi topik menarik dan dinamis sehingga definisi dan konsep lainnya bermunculan. *Smart City* tidak saja menjadi amatan dari para ahli bidang perencanaan kota, atau teknologi informasi, tetapi dari bidang sosial (Malene, 2019).

Berdasarkan paparan di atas, definisi tentang *Smart City* cukup beragam. Terlepas dari keluasan dan keragaman konsep ditemukan kata yang berulang, yakni kualitas kehidupan, layanan, warga negara, dan TIK. Keberagaman ini berangkat dari sulitnya

menelusuri pola yang cocok untuk semua kota. Kebutuhan, struktur politik, sejarah, profil sosial ekonomi, kebiasaan, dan budaya kota menjadikannya unik dan berbeda satu sama lain (Schiavo, F.T. 2022).

Untuk memudahkan proses transformasi teknologi maka pelaksanaan konsep *Smart City* ini mampu diterapkan dengan topangan dukungan aplikasi yang terus berkembang sehingga tercipta lingkungan kreatif di bidang teknologi, sebagai langkah awal yang baik menuju kota pintar. Dengan terjadinya transisi kota menuju *Smart City,* wilayah tersebut mampu memfasilitasi ekosistem terbuka, di mana warga dan pemangku kepentingan terlibat bersama dalam menciptakan inovasi yang meningkatkan kehidupan dan perekonomian kota (De Lange & De Waal, 2019).

Salah satu dimensi terpenting dari *Smart City* adalah bahwa kota seharusnya memberikan pelayanan menggunakan teknologi terkini dan membangun infrastruktur yang pintar sehingga dapat memberikan pelayanan yang efektif dan murah kepada seluruh masyarakat yang tinggal di kota tersebut. Berbagai keuntungan dari penerapan kota cerdas, dapat dirasakan warganya mulai dari sudut pandang ekonomi, sosial, budaya maupun lingkungan.

Dari sisi ekonomi, sebuah kota cerdas merupakan kota yang ditopang oleh perekonomian yang baik dengan memaksimalkan sumber daya atau potensi kota, termasuk layanan teknologi informasi dan komunikasi, tata kelola dan peran sumber daya manusia yang baik. Dari sisi sosial, kota cerdas ialah kota yang masyarakatnya memiliki keamanan, kemudahan, dan kenyamanan dalam melakukan interaksi sosial dengan sesama masyarakat ataupun dengan pemerintah. Ditinjau dari sudut lingkungan, warga yang tinggal di kota yang cerdas berkesempatan memperoleh tempat hunian yang sehat, layak, hemat dalam penggunaan energi, serta didukung teknologi informasi dan komunikasi yang baik. Dengan strategi *Smart City*, selain penataan kota, daya saing ekonomi kompetitif, dimensi lain pun akan berubah. Dimensi keamanan, sistem sosial akan lebih aman dan ditinjau dari dimensi teknologi, warga akan merasa lebih nyaman.

Tabel 1 menunjukkan bahwa implementasi *Smart City* tak lain bertujuan membentuk dan menerapkan suatu kota yang aman, nyaman, terkendali dan mempermudah akses bagi warganya, serta memperkuat daya saing kota dalam hal perekonomian, sosial, dan teknologi.

Tabel 1 Komponen *Smart City*

Smart Living	*Smart Environment*
- Kemudahan akses terhadap layanan pendidikan - Kemudahan akses terhadap layanan kesehatan - Pengembangan peran media - Kemudahan akses terhadap jaminan keamanan	- Pengelolaan lingkungan berbasis IT - Pengelolaan SDA berbasis IT - Pengembangan sumber energi terbarukan
Smart Infrastructure	*Smart Governance*
- Pengembangan jaringan IT - Pengembangan *transport* berbasis IT - Pengembangan sistem informasi manajemen berbasis IT	- Pengembangan *e-governance* - Ada partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
Smart Economy	*Smart People*
- Pengembangan *city branding* - Pengembangan kewirausahaan - Pengembangan *e-commerce*	- pendidikan dan pengembangan SDM yang melek teknologi. - dukungan penelitian - pengembangan karakter sosial budaya masyarakat
Framework	Strategi
Efisien dalam pemanfaatan sumber daya untuk	mengembangkan peran layanan sistem informasi industri, produk, dan pasar

membangun daya saing kota	dalam meningkatkan nilai tambah perekonomian kota (*e-commerce*)
Pengembangan tata kelola pemerintahan cerdas *(smart governance)* dalam pengelolaan perkotaan yang inovatif, efisien, dan berbasis ICT.	- membangun jaringan komunikasi pemerintah swasta dan masyarakat berbasis ICT - meningkatkan penggunaan *e-governance* dalam pengelolaan pemerintahan (kebijakan dan penganggaran) serta sistem pelayanan publik yang ramah masyarakat - meningkatkan partisipasi dan menjembatani inovasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan perkotaan
Pengembangan infrastruktur cerdas (*smart infrastructure)* dalam upaya peningkatan daya saing kota melalui pelayanan cepat dan tepat	- mengembangkan akses dan jaringan informasi berbasis teknologi secara luas - mengembangkan sarana dan prasarana *system* pengelolaan transportasi berbasis ICT secara cepat dan tepat - mengembangkan sarana prasarana, *system* manajemen dan informasi pendidikan, serta keterkaitannya dengan sektor lain berbasis ICT - mengembangkan sistem manajemen keamanan perkotaan berbasis ICT

Sumber: Cohen, 2013 (diolah)

Konsep *Smart City* menjadi isu global di sejumlah negara di dunia dan menstimulan kota-kota di dunia untuk mendorong peran aktif masyarakatnya dalam pengelolaan kota dengan menggeser pola pemerintahannya menjadi *citizen centric*. Dengan demikian, terjadi interaksi dinamis dan erat antara penyedia layanan, yakni pemerintah dengan warganya. Model ini melahirkan interaksi dua

arah yang terus berkembang dan berproses dalam pembangunan kota yang diimpikan, nyaman, serta responsif terhadap perubahan dan tantangan.

Tren pembangunan *Smart City* telah memengaruhi cara berpikir dan semangat para *decision maker,* baik di negara maju maupun berkembang. Negara yang sibuk menata diri menuju *Smart City,* di antaranya Barcelona, Mumbai, Tokyo, Seoul, Melbourne, Shanghai, Singapura, dan Indonesia dengan karakteristik maupun prioritas pembangunan masing-masing. Rata-rata untuk negara-negara maju di Barat, lebih berkonsentrasi pada bidang, seperti energi, lingkungan, dan layanan kota untuk menyelesaikan masalah utama di setiap kota dan meningkatkan kualitas hidup. Tercatat, prioritas itu mencapai 70% dari pembiayaan untuk *Smart City*. Sedangkan Asia, negara-negara seperti Cina dan India telah berkembang investasi dalam pembangunan perkotaan dan infrastruktur di dalam rangka meningkatkan daya saing nasional (Lee, 2017).

Dengan mengusung kota pintar yang semua layanan, baik administrasi, infrastruktur sampai dengan pembangunan dengan model berkelanjutan yang ramah lingkungan, dijadikan sebagai alat pengendali arus urbanisasi dengan diarahkan sebagai pusat pertumbuhan yang mendorong keterkaitan kota dan desa beserta wilayah yang ada di sekitarnya. Dalam pengembangan *Smart City*, penerapan teknologi tidak hanya fokus pada peningkatan pencapaian target pertumbuhan ekonomi, tetapi mengabaikan karakteristik dan kesiapan masyarakat penerima. Oleh karena itu, *Smart City* seharusnya mampu menyeimbangkan kekuatan ekonomi dan memberikan kesempatan memperkaya komunitas masyarakat secara merata (Jiang, 2021).

Kebijakan Implementasi *Smart City* di Indonesia

Konsep *Smart City* di Indonesia, rencana, dan target pencapaiannya telah masuk dalam Road Map Pembangunan Perkotaan Nasional tahun 2015-2045 dan disusun oleh Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional). Dalam *road map*

tersebut, telah ditetapkan beberapa target pencapaian *Smart City* di Indonesia, sebagai berikut.

1. Dibangun dengan tidak mengorbankan asetnya, melainkan terus memupuk sumber daya alam, lingkungan, dan kualitas prasarana kota untuk menjawab isu perubahan iklan melalui tindakan mitigasi dan adaptasi.
2. Memenuhi berbagai macam kebutuhan hidup warganya sehingga dapat mencapai kesejahteraan dengan tetap mampu menjaga kualitas lingkungan.
3. Mampu menggunakan SDM, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern (ICT) dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan tinggi dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat.

Pada tahun 2021, sebanyak 100 kota/kabupaten di Indonesia mengimplementasikan *Smart City* (Indo Telco, 2021). Jumlah ini tidak sepadan dengan kepadatan penduduk di tanah air sehingga dapat dikatakan bahwa pengembangan *Smart City* di Indonesia lambat. Kelambanan ini disebabkan berbagai faktor, seperti kesiapan pemerintah daerah dan masyarakatnya, terutama dari segi pembiayaan instalasi dan jaringan optik. Mengingat kompleksitas persoalannya beragam, maka bentuk implementasi *Smart City* pun beragam. Banyak yang menerapkan layanan masyarakat berbasis android yang terpisah dan beberapa sudah terintegrasi satu sama lain. Jenis-jenis layanan *Smart City* dapat diakses melalui aplikasi *Smart City*. Jenis layanan itu meliputi layanan pemantauan CCTV kota, pengaduan masyarakat, informasi wisata dan UMKM, administrasi kependudukan, perizinan, dan sebagainya. Di beberapa kota, seperti Tangerang, Bandung, Jogja, Cimahi, dan Cilegon layanan tersebut terintegrasi dan dapat diakses melalui satu aplikasi *Smart City.* Terutama di masa pandemi Covid-19 ini, pemanfaatan digital menjadi media utama dalam memberikan layanan sehingga konsep *Smart City* tidak hanya berkenaan teknologi informasi, tetapi sekaligus menjadi upaya

untuk menekan penyebaran virus dengan meminimalkan interaksi fisik.

Melalui *Gerakan Menuju Smart City*, Kemenkraf melakukan bimbingan teknis kepada para *stakeholder* pariwisata untuk memanfaatkan teknologi dan inovasi dalam membangkitkan industri pariwisata. Akibat pandemi Covid-19, jumlah kunjungan tahun 2020 hanya 4.052.000 orang, menurun 75% dibanding tahun sebelumnya. Pemberian contoh-contoh promosi objek wisata melalui *platform* digital dan pengembangan aplikasi untuk UMKM digalakkan untuk dapat meningkatkan literasi digital masyarakat. Rangkaian program ini selaras dengan konsep *Smart City,* yakni *Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society dan Smart Environment.*

Implementasi *Smart City* di Yogyakarta dalam *Empowering* Masyarakat

Sebagai kota budaya dan pelajar, Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota berpotensi di tanah air untuk menerapkan konsep *Smart City.* Modal dasar yang dimiliki oleh kota Yogyakarta, antara lain faktor histori kesejarahan, yaitu sebelum Indonesia merdeka, Yogyakarta merupakan daerah yang mempunyai pemerintahan sendiri atau Daerah Swapraja, yaitu Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman. Sejarah selanjutnya mencatat bahwa kedudukan DIY sebagai daerah otonom setingkat provinsi sesuai dengan maksud Pasal 18 Undang Undang Dasar 1945. Ketika para pejuang mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), DIY mempunyai peranan penting dengan penetapan sebagai ibu kota negara pada tanggal 4 Januari 1946 sampai dengan tanggal 27 Desember 1949. Kekayaan budaya (*cultural capital*) yang tak lekang oleh perubahan zaman menjadi ciri Kota Yogyakarta selanjutnya. Hal ini ditandai dengan modal sosial (*social capital*), kecerdasan local (*local wisdoms*), serta modal insani (*human capital*) kreatif dan inovatif, egaliter, dan toleransi tinggi.

Sebagai salah satu destinasi wisata Indonesia, Yogyakarta dikenal sebagai kota yang nyaman untuk ditinggali (*liveable city*) dan acapkali disebut sebagai miniatur Indonesia karena banyak mahasiswa dari berbagai penjuru tanah air, studi atau bekerja, tinggal menetap di Yogyakarta. Beragam kekayaan adat istiadat asli mereka dapat berbaur dengan kekayaan budaya lokal. Penyatuan berbagai unsur budaya ini diterima dengan baik oleh masyarakat Yogyakarta yang dikenal ramah sekaligus terbuka pada perubahan. Modernitas di satu sisi menjadi tujuan, tetapi sisi yang lain tidak mencampakkan karifan lokal yang dibanggakan.

Implementasi *Smart City* ditopang landasan hukum, yakni Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 100 tahun 2018 tentang Masterplan Pengembangan *Smart City* Kota Yogyakarta. Dalam masterplan ini, disajikan mulai arah kebijakan, strategi pengembangan, dan penyelenggaraan program perangkat daerah dalam jangka lima tahun (2018-2022). Masterplan ini berfungsi sebagai pedoman inovasi bagi pemkot sekaligus menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam mengembangkan program yang mendukung *Smart City.*

Apabila diukur berdasarkan tahapan-tahapan kota menuju *Smart City,* maka Yogyakarta dapat dikategorikan menapak ke sana walau ritme alur perkembangan belumlah dikatakan amat sempurna. Sebagai fase awal, mulai tahun 2018, infrastruktur jaringan teknologi informatika dan komunikasi fisik telah terbangun, yang terdiri dari jaringan fiber optik dan nirkabel. Infrastruktur ini telah menopang kinerja jajaran Pemkot Yogyakarta secara terintegrasi dan terhubung dengan data sentral. Sebagai penanggung jawab pengelola ekosistem progam *Smart City* adalah Kepala Dinas Komunikasi dan informasi. Tim ini dapat mengusulkan program ke dalam Renja SKPD dan RKPD kepada setiap OPD dan pagu anggaran kegiatan *Smart City* kepada Tim Anggaran Pemda. Tim ini bertanggung jawab menjamin sinkronisasi program dengan RPJMD, Renstra SKPD, dan Renja SKPD. Tahapan selanjutnya, membangun konektivitas antar-OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan membangun akses portal antara

pelayanan yang diselenggarakan pemerintah dan penggunanya adalah masyarakat, telah terintegrasi secara normal. Berikutnya adalah tahapan internalisasi baik bagi perangkat pemerintah sebagai pemberi layanan dan masyarakat sebagai pihak pemanfaat.

Bagian penting dari implementasi *Smart City* adalah partisipasi masyarakat yang membangkitkan pemberdayaan di berbagai wilayah kampung di Kota Yogyakarta. Untuk melihat capaiannya, indikator sasaran keberdayaan masyarakat meningkat dilihat dari Indeks Keberdayaan Masyarakat. Indeks ini merupakan komposit tiga indikator, yaitu: (1) pemberdayaan masyarakat berbasis kampung; (2) persentase perempuan tidak mengalami kekerasan; dan (3) persentase anak tidak mengalami kekerasan. Pemberdayaan masyarakat berbasis kampung dihitung dari proporsi kampung yang aktif, ditandai dengan deklarasi beberapa jenis tematik pembangunan dari keseluruhan kampung. Indeks ini berbobot 60 persen sehingga perhitungannya menghasilkan angka dalam persen 24,35. Sedangkan gabungan persentase perempuan dan anak yang tidak mengalami kekerasan, memiliki bobot 40 persen. Penghitungannya adalah dengan mencari rata-rata capaian dari dua indikator tersebut, baru dikalikan dengan bobot 40 persen. Hasilnya dalam persen adalah 39,98. Indeks keberdayaan masyarakat sendiri merupakan gabungan atau penambahan dari dua bobot indeks tersebut, yaitu 24,35 dan 39,98. Hasil akhirnya adalah 64,33. Jika dibandingkan dengan target pemerintah kota, yaitu 63,86; maka realisasi tersebut masih melampaui target, dengan tingkat capaian 100,74 persen (Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2022)

Indeks keberdayaan masyarakat ini meningkat disebabkan banyak faktor. Pembatasan di masa pandemi justru menumbuhkan banyak inisiatif lokal swadaya masyarakat, misalkan Dapur Umum dan berbagai tema kerelawanan (Hijau, Pendidikan, Kesehatan, dan lain-lain). Pendampingan lembaga masyarakat. Berbagai inovasi skema, misalkan melalui WhastApp *group* juga pelatihan keterampilan bagi peningkatan peranan wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) dan pendampingan kader Posyandu.

Fenomena ini mempertegas munculnya inovasi pemberdayaan berbasis kampung. Selain itu, upaya tersebut diikuti dengan inovasi pemberdayaan dan perlindungan perempuan. Munculnya kasus KDRT pada masa pandemik, menyegerakan OPD untuk memikirkan penanganan korban bekerja sama dengan masyarakat. Contoh terbentuknya *Corpu (Corporate University*) pada bulan Mei 2022 menjadi salah satu strategi *link and match* antara pembelajaran dan pencapaian target organisasi. Selain memberikan informasi rencana pembangunan, Corpu merupakan bentuk komitmen terhadap penyiapan SDM khususnya aparat sipil negara dalam menghadapi dinamika yang kompleks. Sebagai contoh, dalam menjaring aspirasi warga menangani masalah sampah ketika Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan penuh, Bappeda Kota Yogyakarta mengadakan rembug warga secara *online.* Pendekatan ini adalah bentuk perwujudan *smart governance, smart people, dan smart environment*.

Impact Smart City di bidang ketahanan pangan turut dirasakan warga Yogyakarta**.** Indikator sasaran Ketahanan Pangan Masyarakat Meningkat adalah Pola Pangan Harapan. Pola Pangan Harapan (PPH) atau *Desirable Dietary Pattern* (DDP).Target pola pangan harapan pada tahun 2020 adalah sebesar 87,5, adapun realisasi tahun 2020 adalah 94,3 sehingga tingkat capaiannya 107,77 persen (Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2022). Upaya peningkatan ketahanan pangan dilakukan dengan berbagai cara di tahun 2020, pengembangan kampung sayur di tiga lokasi, yaitu: (1) Kelurahan Karangwaru (Kelompok Tanam Tuwuh dan Kampung Karangwaru Kidul); (2) Kelurahan Kricak (Kelompok Ngremboko dan Kampung Kricak); dan (3) Kelurahan Bausasran (Kelompok Gemah Ripah dan Kampung Bausasran). Ketiga kelompok tersebut telah mendapatkan pembinaan berupa bimtek pengembangan kampung sayur pada bulan Februari tahun 2020. Selama bimtek, warga masyarakat diberikan pelatihan mengenai pengembangan budidaya sayur, pengemasan produk pascapanen, dan pengelolaan manajemen kelompok. Di samping Kampung Sayur, melalui anggaran Dana Keistimewaan, Dinas Pertanian dan Pangan telah

membentuk Lumbung Mataraman di tiga lokasi, yaitu di Kelurahan Karangwatu, Suryodiningratan, dan Purbayan. Lumbung Mataraman ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat melalui penanaman sayur serta budidaya lele cendol.

Selain ketahanan pangan, warga semakin memahami upaya peningkatan sistem kewaspadaan pangan. Dalam konteks konsumsi dan kewaspadaan pangan, Dinas Pertanian dan Pangan menyusun data Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi. Ketahanan pangan (*food security*) diartikan sebagai ketersediaan pangan dan kemampuan masyarakat di dalam wilayah itu untuk memperolehnya. Dalam rangka itu pula, melalui program *blusuka*n rutin, Wakil Walikota Yogyakarta, Drs. Heroe Poerwadi, M.A., mengimbau warga Yogyakarta untuk memanfaatkan pekarangan menanam apa yang dimakan dan makan apa yang ditanam.

Tiga tahun program *Nglarisi* dan *Dodolan Kampung* yang dapat diakses melalui JSS, telah mampu memekarkan jumlah UMKM yang tergabung dan memfasilitasi jamuan Pemkot Yogyakarta pada saat rapat-rapat kantor. Langkah nyata ini patut ditingkatkan keberdayaannya terutama dalam kelembagaan UMKM yang tergabung dalam program *Nglarisi.* Kerja sama lima pilar (Kota, Komunitas, Korporate, Kampus, dan Kampung) yang dikenal *Gandeng Gendong* dan selalu didengungkan Wakil Walikota tersebut, beriringan dengan implementasi *Smart City* untuk mengurangi angka kemiskinan di Yogyakarta sekaligus mendekatkan pelayanan publik sesuai ekspektasi warganya.

Apakah *Smart City* memiliki dampak langsung terhadap pengurangan angka kemiskinan itu? Hal ini dapat ditelusuri dari kemudahan-kemudahan yang diberikan penyedia pelayanan publik, baik yang dilakukan pemerintah maupun sektor swasta dan perguruan tinggi. Akses informasi, teknologi, berbagai bantuan penguatan modal usaha dan kesehatan contohnya dapat terdistribusi ke warga adalah bukti bahwa *Smart City* bermakna dalam mewujudkan tugas berat pemerintah menurunkan angka kemiskinan. Sebaliknya, seandainya koordinasi di level kemantren terhambat dengan minimnya akses informasi, fasilitas internet, dan

lain-lain, maka pemangku kepentingan akan kesulitan *updating data* jumlah orang miskin baru atau jumlah anak-anak yang menjadi yatim piatu karena bencana.

Pengembangan S*mart City* di Yogyakarta tidak hanya dimainkan aktor pemerintah saja sebagai penyelenggara pelayanan publik. Praktek *e-commerce* dilakukan PT Telkom dalam mengembangkan *smart business* bagi UMKM di tahun 2019 dengan pemberian akses informasi cepat, terbuka, dan membuka peluang usaha bagi UMKM (Fauziyah, dkk, 2019). Tingginya angka pengangguran akibat pandemi Covid 19, Pemerintah Kota Yogyakarta merevisi target Indeks Gini pada Tahun 2020 yang semula 0,397 menjadi 0,592. Dengan realisasi Indeks Gini sebesar 0,399, maka tingkat capaiannya sebesar 132,60 persen.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022 yang diterbitkan Pemerintah Kota Yogyakarta tercatat bahwa faktor pendorong dalam mencapai sasaran Ketimpangan Pendapatan Antar penduduk Menurun, meliputi:

a. kualitas produk yang dipamerkan meningkat;
b. kolaborasi metode *online*/daring dan *offline*/luring sudah mulai dirintis;
c. penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan pameran;
d. adanya himbauan yang mendorong ASN dan masyarakat lokal untuk membeli produk UKM lokal;
e. penguatan SIM Pemberdayaan untuk menentukan calon peserta pelatihan dinilai mampu mengurangi duplikasi personil yang sudah mendapat pelatihan;
f. pembagian kluster UKM yang memudahkan pemberian jenis intervensi sesuai kebutuhan kluster tersebut;
g. semakin banyak koperasi yang dikelola secara profesional dan mendapatkan dukungan untuk pengembangan usaha dari insitusi induknya;
h. koperasi masih diminati oleh sebagian besar anggota masyarakat;
i. peningkatan kapasitas sumber daya koperasi melalui

pendidikan dan pelatihan berbentuk pelatihan *vocasional* agar langsung bisa diterapkan oleh peserta pelatihan serta pelatihan peningkatan kompetensi bagi sumber daya manusia koperasi;

j. tersedianya sarana bagi koperasi untuk berkonsultasi, baik secara langsung datang ke dinas maupun secara tidak langsung melalui klinik koperasi sehat dan pendampingan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL); dan

k. adanya sinergitas yang baik antara pemangku kepentingan koperasi (dinas, Dewan Koperasi Indonesia Daerah, Asosiasi BMT se-Indonesia, Forum Komunikasi Koperasi, Jaringan Koperasi Syariah Muhammadiyah, dan Pusat Koperasi).

Berdasarkan data di atas, tampak bahwa implementasi *Smart City* mengedepankan sinergitas dari semua aktor melalui komunikasi yang efektif. Selain pembangunan infrastruktur yang menjadi fokus utama, *Smart City* diharapkan mendorong optimalisasi pemberdayaan, termasuk membina masyarakat. Pemerintah berperan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam implementasi *Smart City*. Apabila pembangunan dan kemajuan kota ini berhasil, akan memberikan banyak manfaat bagi warganya. Sebaliknya, segala fasilitas dan teknologi yang ada di suatu wilayah kurang berfungsi dengan baik, jika warga tidak ikut terlibat dalam proses pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan. Sebagai penjembatan, maka kondisi ini memerlukan ruang dialog warga dalam mewujudkan *Smart City*. Hal ini bisa dilakukan secara *offline* atau menggunakan aplikasi yang bisa menampung aspirasi masyarakat secara luas.

Selain itu, dalam menjalankan konsep *Smart City* dibutuhkan juga partisipasi dari masyarakat dalam mendukung nilai demokrasi dan peningkatan rasa tanggung jawab terhadap kepentingan umum. Dengan adanya aplikasi *Jogja Smart Service (*JSS) yang semakin gencar penggunaannya pada masa pandemi, cukup membantu pemerintah dalam membangun kota dengan melibatkan berbagai aktor. Peningkatan kapasitas peranan RW (Rukun Warga)

turut ditingkatkan dalam mengenalkan JSS. Upaya ini guna meningkatkan pengetahuan serta kemampuan dalam menggali dan menghitung potensi swadaya murni dalam pelaksanaan pembangunan berbasis teknologi informasi dan komunikasi oleh masyarakat.

Laporan Forum LPPM tahun 2020 mencatat bahwa selama pandemi berkembang metode daring dan *blended learning* dalam program pemberdayaan di masyarakat. Penelitian berbasis aplikasi yang dilakukan perguruan tinggi hasilnya bermanfaat bagi warga. Hal ini sebagai bukti adanya kolaborasi *triple helix* ABG (*Academy, Bussines and Government*) dalam pengembangan ekonomi kreatif Kota Yogyakarta (Supriyanta, Anggraini, 2021).

Meskipun Yogyakarta masih terus berproses menuju *Smart City*, tantangan dan hambatan muncul dalam pelaksanaan *Smart City.* Berdasar sejumlah pengamatan di sejumlah kemantren di Kota Yogyakarta, hambatan pertama muncul dari sisi sumber daya manusia pelaksana. Dalam penerapan *Smart City,* kurangnya staf di bidang ilmu teknologi menjadi penghambat penerapan *Smart City*. Observasi menunjukkan masih kurangnya pemahaman petugas terhadap tugas dan fungsi dalam menjalankan program *Smart City*. Staf yang terampil sangat diperlukan dalam *maintenance data* maupun penyajian data secara *real time* yang dibutuhkan masyarakat. Dengan bersandar pada kekuatan inovasi dan upaya nyata dalam manajemen inovasi, *Internet of Things* (IoT) perlu mendapat perhatian sebagai salah satu *enabler* horizontal untuk aplikasi *Smart City*.

Selain itu, keterlibatan pemangku kepentingan diperlukan dalam mendukung *Smart City*. Hingga awal 2022, keterlibatan mereka masih dalam kapasitas terbatas sehingga memerlukan keterlibatan aktif pemangku kepentingan. Beberapa program inovasi di level kemantren perlu pengawalan mereka hingga mampu mendorong partisipasi yang lebih tinggi. Program pemberdayaan UMKM dan kampung melalui *Nglarisi dan Dodolan Kampung* masih jauh dari upaya *Smart Economy,* yakni *cashless society.* Transaksi masih dengan cara tunai, jarang dengan *e-*

banking karena tidak semua UMKM siap dan atau lebih senang menerima uang *cash.* JSS lebih bertindak sebagai etalase digital dan penghubung UKM saja. Dengan demikian, literasi *Smart Economy* perlu terus di-*sounding* di masyarakat.

Koordinasi di lapangan menunjukkan bahwa persoalan klasik ini masih muncul sehingga menyulitkan berbagai program terealisasi dengan target baik. Hal ini terjadi di level OPD, jaringan kampus, maupun korporasi hingga level pelaksana di kemantren. Koordinasi yang lebih baik sangat dibutuhkan sehingga setiap elemen masyarakat dapat berkolaborasi dan berkonstribusi yang maksimal dalam pembangunan.

Kesimpulan

Implementasi *Smart City* di Yogyakarta berproses menuju kota impian yang diharapkan warganya. Dengan modalitas yang dimiliki kota budaya ini, dalam pencapaian *Smart City* mengedepankan sinergitas dari semua aktor melalui komunikasi yang cukup efektif. Dampak nyata yang dirasakan warganya antara lain pembangunan infrastruktur bergandengan dengan optimalisasi pemberdayaan. Pemerintah berperan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam implementasi *Smart City*. Sejumlah ruang dialog warga telah tersedia dalam mewujudkan *Smart City*. Hal ini selayaknya ditingkatkan dalam mendukung nilai demokrasi dan peningkatan rasa tanggung jawab terhadap kepentingan umum. *Lesson learning* lain yang dapat menjadi inspirasi daerah lain bahwa Program Gandeng Gendong dengan 100 inovasi di OPD dan kemantren di Kota Yogyakarta, ditopang implementasi *Smart City* memberikan pelayanan publik lebih baik pada warga sehingga mampu menekan angka kemiskinan di Yogyakarta.

Daftar Pustaka

Allwinkle, Sam & Peter Cruickshank (2011) Creating Smart-er Cities: An Overview, Journal of Urban Technology, 18:2, 1-16, DOI: 10.1080/10630732.2011.601103

Borsekova Kamila, Samuel Koróny, Anna Vaňová, Katarína Vitálišová, (2018), Functionality between the size and indicators of smart cities: A research challenge with policy implications, *Cities,* Volume 78, Pages 17-26, ISSN 0264-2751, https://doi.org/10.1016/j.cities.2018.03.010

CHOI, Choongik, Junho CHOI, Chulmin KIM, Dongkwan & LEE, D. (2020). The Smart City Evolution in South Korea: Findings from Big Data Analytics. The Journal of Asian Finance, Economics and Business, 7(1), 301–311. https://doi.org/10.13106/JAFEB.2020.VOL7.NO1.301

Cohen, Boyd. (2013). What exactly a smart city? http://www.boydcohen.com/smartcities.html

De Lange, M., & De Waal, M. (2019). *The Hackable City: Digital Media and Collaborative City-Making in the Network Society* (p. 302). Springer Nature. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-981-13-2694-3.pdf?pdf=button

Fauziyah, Cika; Priyambodo, Tri Kuntoro Giyarsih, S. R., (2019), Kontribusi PT. TELKOM dalam Pengembangan UMKM Perkotaan di Kota Yogyakarta. Majalah Geografi Indonesia, 33(2),14–21.

Giffinger, R.F.C.; Kramar, H.; Kalasek, R.; Pichler-Milanovi´c, N.; Meijers, E. (*2007), Smart Cities: Ranking of European Medium-Sized Cities*; Vienna University of Technology, Centre of Regional Science (SRF): Vienna, Austria, 2007

Indo Telko. (2021). 100 Kota sudah adopsi smart city di Indonesia. https://www.indotelko.com/read/1639606244/100-indonesia. Diakses 2 Agustus 2022

Jiang, Y. (2021) Economic Development of Smart City Industry Based on 5G Network and Wireless Sensors. Microprocess. Microsyst., 80, 103563.

Lee, J. (2017). Smart city policies and future directions, Korea Research Institute for Human Settlements presentation document the Fututre City? Mobilities and Automation. Jurnal Sustainability Volume 11 Issue 1 Article 221. Hal 3. https://doi.org/10.3390/su11010221

Praharaj, Sarbeswar, Jung Hoon Han, Scott Hawken, (2018),Urban innovation through policy integration: Critical perspectives from 100 smart cities mission in India, *City, Culture and Society,* Volume 12, 2018, Pages 35-43, ISSN 1877-9166, https://doi.org/10.1016/j.ccs.2017.06.004.

Shapiro; Smart Cities: Quality of Life, Productivity, and the Growth Effects of Human Capital. *The Review of Economics and Statistics* 2006; 88 (2): 324–335. doi: https://doi.org/10.1162/rest.88.2.324.

Schiavo, F.T. (2022);Magalhães,C.F.d. Smart Sustainable Cities: The Essentials for Managers' and Leaders' Initiatives within the Complex Context of Differing Definitions and Assessments. Smart Cities 2022, 5,994–1024. https://doi.org/10.3390/smartcities5030050.

Sengers, F., Späth, P., & Raven, R. (2018). Smart city construction: Towards an analytical framework for smart urban living labs. Urban Living Labs. https://doi.org/10.4324/9781315230641-5/smart-city-construction-frans sengers philipp-sp%C3%A4th-rob-raven

Suhono, Supangkat, (2015). Anatomi Kota dan Smart City, Indonesia Smart city Initiatives http://www.smartcityindonesia.org/

Supriyanta, Oktiva Anggraini, REKAPITALISASI MODAL SOSIAL DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF BERBASIS TRIPLE HELIX DI YOGYAKARTA ERA NORMAL BARU, PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPERS FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS KRISTEN IMMANUEL:

"Transformasi Indonesia 2021: Inovasi & Strategi Pemulihan Ekonomi Pascapandemi Covid-19". *Prociding,* 2021. https://journal.ukrim.ac.id/index.php/PFE/article/view/289/222

Sumber lain

BPS, 2020.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2022, Pemerintah Kota Yogyakarta.

http://www.smartcityindonesa.org/

http://www.sekolahkampus.com

Road Map Pembangunan Perkotaan Nasional Tahun 2015-2045 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2018.

Laporan Forum LPPM Tahun 2020.

United Nations. Sustainable Development Goal 11+—Make Cities and Human Settlements Inclusive, Safe, Resilient and Sustainable; UN Department of Economic and Social Affairs: New York, NY, USA, 2019.

GERAKAN KAMPUNG PANCA TERTIB GUNA MENUNJANG KETERTIBAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KOTA YOGYAKARTA

Maria Andrayani Bolin, Imaculata Kewa Are, Mia Audina Ismail, Venti Anggraini, Daniel Arkalaus Mailani

A. Perubahan Sosial

Pentingnya keterlibatan pemerintah dalam menjaga kenyamanan dan ketertiban masyarakat sangat dibutuhkan, melihat begitu banyak kasus pelanggaran lalu lintas di Kota Yogyakarta yang sangat memprihatinkan. Pelanggaran ini terkait dengan karakter warga, seperti kesopanan, gotong royong, berbudaya, peduli, dan tanggung jawab. Secara umum, warga Kota Yogyakarta dikenal sopan santun, ramah tamah, dan gotong royong yang tinggi. Akibat arus perubahan sosial, maka kondisi kota begitu dinamis. Keterbukaan Kota Yogyakarta menjadikan kota budaya ini menjadi pusat pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa dari luar untuk tinggal di Kota Yogyakarta.

Perubahan sosial termasuk sistem nilai dan norma, diikuti dengan perubahan sikap dan perilaku (Irwan, 2018: 2). Kehidupan sosial warga Yogya demikian mengkhawatirkan. Perilaku warga dan tingkah laku yang melanggar agama, norma, dan etika menjadi ukuran penurunan moralitas. Data kepolisian menunjukkan bahwa sebagian besar jumlah kecelakaan, 61% disebabkan oleh faktor keahlian mengemudi dan karakter pengemudi (Soffania, 2019). Selain kecelakaan lalu lintas yang tampil pada tabel I, pelanggaran parkir sering kali terjadi. Ombudsman RI Perwakilan DIY (2017: 6-8) menyebutkan, selain tidak berizin, parkir liar juga tidak sesuai dengan tata ruang yang ada. Pelanggaran parkir berefek pada berkurangnya ruang bagi pejalan kaki, kemacetan dan ruang publik hanya dimiliki pihak tertentu. Kesadaran tersebut belum terbangun di tengah masyarakat sehingga kontrol sosial belum menjadi instrumen untuk mencegah pelanggaran aturan parkir. Gerakan

kampung Panca Tertib menjadi satu bentuk kepedulian pemerintah dalam melindungi masyarakatnya.

Tabel I
Data Kecelakaan dan Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2019-2021

Elemen	2019	2020	2021	Sumber data
Jumlah kecelakaan lalu lintas	5.944	4.559	5.350	Kepolisian RI
Korban meninggal	419	346	452	Kepolisian RI
Korban luka ringan	7.259	5.715	6.390	Kepolisian RI
Korban luka berat	9	1	6	Kepolisian RI
Kerugian material	2.920.191.000	2.111.235.500	2.393.087.000	Kepolisian RI
Jumlah pelanggaran	404.250.000	74.819	29.615	Kepolisian RI
Denda	13.566.458.000	3.966.307.000	2.578.583.000	Kepolisian RI

Dari tabel I di atas, dapat disimpulkan bahwa jumlah kecelakaan dari tahun 2019-2021 mengalami penurunan. Untuk jumlah yang meninggal dari tahun 2019-2021 mengalami naik turun.

Gerakan kampung Panca Tertib adalah sebuah aktivitas sosial yang dinamis dan berkelanjutan yang dapat dilakukan oleh masyarakat dengan potensi yang ada, edukasi secara persuasif dengan tujuan mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta. Kampung Panca Tertib diterapkan di Kota Yogyakarta di mana Kota Yogyakarta dengan kepadatan penduduk tinggi terutama pada jam kerja, dan juga hal ini merupakan potensi munculnya gangguan umum ketenteraman, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat serta mempertimbangkan

jumlah Aparatur Sipil Negara penegak peraturan perundang-undangan tidak sebanding dengan jumlah penduduk. Kampung Panca Tertib gerakannya lebih berorientasi pada keterlibatan masyarakat secara ketenteraman masyarakat mutlak dibutuhkan keberadaannya. Pola gerakan kampung Panca Tertib yang edukasi secara persuasif dan preemtif menuju kemandirian masyarakat dalam menciptakan kondisi umum, kesejahteraan, dan ketenteraman masyarakat. Berangkat dari latar belakang, rumusan masalahnya adalah bagaimana pelaksanaan Gerakan Kampung Panca Tertib dalam menunjang ketertiban dan kesejahteraan masyarakat Yogyakarta?

Sejarah Kampung Panca Tertib Yogyakarta

Kota Yogyakarta adalah ibu kota dan pusat pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kota ini adalah kota yang mempertahankan konsep tradisional dan budaya Jawa. Kota Yogyakarta adalah kediaman bagi Sri Sultan Hamengkubuwana X dan Adipati Paku Alam IX. Kota Yogyakarta merupakan kota terbesar keempat di wilayah pulau Jawa bagian selatan menurut jumlah penduduk Kota Yogyakarta juga pernah menjadi Ibu Kota Republik Indonesia pada tahun 1946. Kota Yogyakarta dikenal sebagai Kota Pelajar hampir 20% penduduk produktifnya adalah pelajar dan terdapat 137 perguruan tinggi. Ini diwarnai dinamika pelajar dan mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Pertumbuhan penduduk kota dari tahun ke tahun cukup tinggi sampai pada akhir Desember tahun 2000 tercatat penduduk kota Yogyakarta sebanyak 426.116 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata 15.197/km^2. Angka harapan hidup penduduk Kota Yogyakarta menurut jenis kelamin, laki-laki usia 25-72 tahun dan perempuan usia 31-76 tahun.

Tabel II
Pertumbuhan Penduduk Kota Yogyakarta

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Tegalrejo	18265	19110	37.375
Jetis	13320	14061	27.381
Gondokusuman	20851	22289	43.140
Danurejan	10475	10915	21.390
Gedong Tengen	9758	10128	19.886
Ngampilan	9079	9404	18.483
Wirobrajan	13701	14383	28.048
Mantrijeron	17360	18273	35.633
Kraton	10662	11243	21.905
Gondomanan	7309	7681	14.990
Pakualaman	5156	5575	10.731
Mergangsan	15518	16495	32.013
Umbulharjo	34549	45989	50.538
Kotagede	17068	17499	34.567
Total	203.071	223.045	426.116

Dari tabel II tampak bahwa populasi perempuan lebih banyak dari laki-laki.

Kota Yogyakarta telah mencanangkan inovasi kampung penertiban (gerakan Kampung Panca Tertib) sejak tahun 2015. Inovasi ini semakin diminati dan mendapat tempat di hati warga masyarakat kota Yogyakarta. Awal direncanakan inovasi pada tahun 2015 terdapat 5 kampung sebagai *pilot project*. Sampai dengan tahun 2021 terdapat 103 kampung yang telah mendeklarasikan sebagai Kampung Panca Tertib dari 170 kampung yang ada di kota Yogyakarta pada tahun 2021, inovasi Kampung Panca Tertib berhasil menempati puncak prestasi tertinggi nasional sebagai top 45 inovasi terpuji pada ajang kompetensi inovasi pelayanan publik pada tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Penyelenggaraan peraturan daerah Nomor 26 tahun 2002

tentang Penataan Pedagang Kaki Lima didominasi penegakan peraturan daerah yang dilakukan satuan polisi pamong praja Kota Yogyakarta sepanjang tahun. Kasus yang sedang marak juga terjadi di kota Yogyakarta dengan pelanggaran Perda pelanggaran reklame dan pelanggaran Perda Nomor 18 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran sebanyak 50 kasus yang ditangani.

Keadaan demikian sulit menciptakan kondisi warga Kota Yogyakarta atau siapa pun yang tidak melakukan pelanggaran peraturan daerah karena buah dari kesadaran dan pemahaman terhadap ketentuan aturan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pada tahun 2015 lahir sebuah inovasi Kampung Panca Tertib atau gerakan Kampung Panca Tertib yang menghadirkan pendekatan baru dalam cipta kondisi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat menuju tegaknya peraturan daerah di Kota Yogyakarta.

B. Jenis-Jenis Kampung Panca Tertib

Kondisi ketertiban meliputi tertib daerah milik jalan, tertib bangunan, tertib usaha, tertib lingkungan, dan tertib sosial.

1. Tertib Daerah milik jalan

Tertib daerah milik jalan adalah pemanfaatan daerah milik jalan sesuai dengan fungsinya dan atau telah mendapatkan izin sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku. Peraturan daerah Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pencapaian dimaksud adalah keteraturan sosial oleh segenap warga kampung sehingga terwujud sebuah Kampung Panca Tertib, yakni kampung dengan jalinan hidup warga masyarakat yang harmoni, guyub rukun dalam membangun kebersamaan segenap warga kampung dan dengan sadar memberikan hak pemenuhan ruang daerah milik jalan-jalan di kampung difungsikan sebagaimana mestinya. Hak pejalan kaki diprioritaskan sebagai perwujudan tertib daerah milik jalan.

Pemahaman bahwa tertib daerah milik jalan tidak seharusnya ditempati atau dipakai atau dipenuhi untuk kegiatan usaha, tidak

untuk menaruh barang, dan tidak melakukan aktivitas tanpa ada izin. Jika dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu, harus berizin dan pemanfaatannya sesuai peraturan yang berlaku, seperti berikut.

- PKL menempati lokasi usaha yang diizinkan dan sudah lengkap.
- Dasaran tempat usaha PKL bongkar pasang.
- PKL masih menyisakan kelebaran trotoar untuk pejalan kaki.
- Masyarakat tidak menempati barang-barang di badan jalan.
- Masyarakat tidak menempatkan kendaraan pribadi di badan jalan atau jalan kampung.
- Ruang tertib daerah milik jalan dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang lebih luas.

2. Tertib Usaha

Tertib usaha adalah semua kegiatan usaha telah memiliki izin dan memenuhi kewajiban usaha serta tidak menjual, menyediakan barang atau jasa yang dilarang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Pondokan, Pasal 18 ayat 1 huruf a yang berbunyi "setiap pemilik pondokan dilarang menyelenggarakan pondokan yang dihuni pemondok yang berbeda jenis kelamin, dalam satu kesatuan". Lalu dalam Pasal 19 huruf a dan b bahwa setiap pemondok dilarang menerima tamu lawan jenis di dalam kamar pondokan dan menggunakan atau memanfaatkan pondokan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemahaman bahwa semua kegiatan usaha wajib memiliki izin, seperti berikut.

- Jenis usaha yang dilakukan tidak melanggar aturan atau barang terlarang.
- Tempat usahanya tidak mengganggu lingkungan, harus sesuai jenis usaha yang diperuntukkan.

3. Tertib Bangunan

Tertib bangunan adalah kegiatan membangun, mengubah, memperluas, mengurangi, dan merawat bangunan gedung yang

memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) sesuai peraturan perundang-undangan. Kampung dengan tatanan kehidupan di mana warganya setiap melakukan aktivitas pembangunan di kampung senantiasa mengedepankan ketaatan pada ketentuan aturan yang berlaku. Setiap warga kampung memiliki kesadaran dan memastikan dirinya bahwa setiap kegiatan mengubah, menambah, mengurangi atau memperbaiki serta membangun bangunan baru wajib memiliki izin mendirikan bangunan-bangunan tidak akan menabrak dan atau bahkan mengganggu fungsi-fungsi kepentingan publik. Kesadaran mempertahankan kelestarian fasilitas publik yang dimanfaatkan oleh publik terjaga dengan baik. Kondisi demikian itu mencerminkan kampung telah berhasil melakukan pencapaian tertib bangunan. Pemahaman bahwa setiap bangunan-bangunan yang berdiri harus memiliki izin tidak mendirikan bangunan di atas vacuum, trotoar, saluran air, dan tanah negara. Orang atau badan agar mengurus IMB terlebih dahulu jika akan:

- membuat bangunan baru;
- mengubah konstruksi bangunan;
- memperluas bangunan; dan
- mengurangi bangunan.

4. Tertib Lingkungan

Tertib lingkungan adalah kondisi lingkungan yang bersih, sehat, indah, dan nyaman sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

Tertib lingkungan atau Perda kebersihan.

- Pemahaman bahwa kondisi lingkungan harus dijaga atau dirawat agar tetap bersih indah, nyaman, dan sehat.
- Selalu menanamkan sikap untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merusak lingkungan, seperti menebang pohon rindang, tetap untuk mencintai lingkungan.
- Tidak melakukan coret- coret tembok, menempel kertas atau *banner* dipasung.
- Tidak membuang sampah sembarangan.

- Mengimplementasikan upaya untuk melakukan pengurangan sampah dan pengelolaan bank sampah secara mandiri.
- Ada ruang terbuka hijau publik atau taman.
- Mewujudkan gerakan menanam tanaman seperti toga atau lorong sayur.
- Mewujudkan kegiatan jam belajar masyarakat
- Mewujudkan kegiatan sadar keamanan lingkungan bebas pekat bebas NAPZA.

5. Tertib Sosial

Tertib sosial adalah tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis dan bebas dari penyakit masyarakat. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, yang dimaksud ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur. Dari beberapa pengertian pada definisi ketertiban umum di atas, dapat disimpulkan bahwa ketertiban umum adalah suatu aturan atau kaidah hukum yang dibuat untuk melindungi kesejahteraan umum serta 14 kondisi dinamis yang memungkinkan kegiatan dengan tenteram tertib dan teratur.

C. Tujuan dan Manfaat Gerakan Kampung Panca Tertib

Gerakan Kampung Panca Tertib memberdayakan masyarakat agar dapat menciptakan dan mengubah pola sikap dan pola perilaku dalam kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib, nyaman, dan bersih melalui sebuah kampung penertib.

Berdasarkan data Pemkot Yogyakarta, ada 170 kampung di Yogyakarta, 103 kampung sudah deklarasi dan 6 sekolah sudah deklarasi *pantib for school.*

Berikut manfaat gerakan Kampung Panca Tertib.

1. Munculnya pelopor ketertiban di wilayah.
2. Adanya kompetisi antar kampung secara sehat untuk mewujudkan aktivitas panca tertib.

3. Penyelesaian masalah trantib dilakukan dengan pendekatan wilayah dan kearifan lokal.
4. Adanya proses penanaman nilai-nilai Segoro Amarto di masyarakat.
5. Berkurangnya gangguan trantib.
6. Mendekatkan pelayanan Pemerintah Kota Yogyakarta kepada warga kampung dalam menyelesaikan berbagai persoalan di kampung.
7. Mengusahakan maksimal agar setiap permasalahan kampung selesai di tingkat kampung.
8. Mendekatkan pelayanan Pemerintah kota Yogyakarta kepada warga kampung dalam menyelesaikan berbagai persoalan di kampung.
9. Mengusahakan maksimal agar setiap permasalahan kampung selesai di tingkat kampung.
10. Mengedepankan semangat musyawarah dan Segoro Amarto dalam menyelesaikan permasalahan kampung.

D. Tahapan Kegiatan Kampung Panca Tertib

Tahapan implementasi gerakan Kampung Panca Tertib adalah berikut.

1. *Prospecting/*Pengenalan

Bertujuan untuk mengenalkan inovasi Kampung Panca Tertib kepada tokoh masyarakat dan representasi warga kampung. Tahap ini menjadi penentu awal apakah inovasi Kampung Panca Tertib diterima atau tidak oleh warga kampung setelah memahami inovasi Kampung Panca Tertib.

2. Pembentukan Forum Kampung Panca Tertib (FKPT)

Bertujuan membentuk wadah gerakan Kampung Panca Tertib rembug kampung sarasehan merencanakan kegiatan, melakukan koordinasi, dan evaluasi pelaksanaan komitmen panca tertib.

3. Pembentukan Koordinator FKPT dan Pelapor Ketertiban

Bertujuan membentuk pengurus FKPT, merupakan relawan sosial yang berasal dari warga masyarakat dalam gerakan Kampung Panca Tertib dari unsur, antara lain: RT, RW, PKK, karang taruna,

satlinmas, dan lembaga sosial lainnya di kampung.

4. Identifikasi Masalah dan Potensi

Melakukan identifikasi masalah dan potensi kampung berdasarkan tertib bangunan, tertib usaha, tertib lingkungan, dan tertib sosial bertujuan untuk mendapatkan skala prioritas permasalahan yang mendesak diselesaikan sebagai bahan dalam menyusun komitmen panca tertib.

5. Menyusun Komitmen Panca Tertib

Yaitu menentukan 5 butir komitmen yang berasal dari skala prioritas hasil identifikasi tertib bangunan, tertib usaha, tertib lingkungan, dan tertib sosial sebagai pedoman kegiatan Kampung Panca Tertib.

6. Menyusun Nota Kesepahaman/MoU

Kesepahaman dari unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, mantri pamong praja, lurah, ketua LPMK dan ketua kampung yang bertujuan melakukan kesepakatan untuk mencanangkan sebuah kampung menjadi Kampung Panca Tertib.

7. Menyusun SK Pelapor ketertiban (Pakerti)

Yaitu menyusun surat keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta yang bertujuan menetapkan Forum Kampung Panca Tertib dan pelapor ketertiban.

8. Menyusun Rencana Aksi Pasca Deklarasi

Adalah menyusun satu rencana aksi prioritas dari 5 butir komitmen panca tertib, merupakan kegiatan unggulan Kampung Panca Tertib yang akan dilakukan setelah deklarasi.

9. Deklarasi Kampung Panca Tertib

Adalah melakukan deklarasi gerakan Kampung Panca Tertib oleh segenap warga kampung dan OPD terkait bertujuan untuk mencanangkan sebuah kampung sebagai Kampung Panca Tertib.

10. Melakukan Aksi Komitmen Panca Tertib

Adalah melakukan aksi dari rencana aksi pasca deklarasi yang bertujuan untuk mewujudkan komitmen panca tertib.

11. Komitmen Panca Tertib

Yaitu melakukan evaluasi dari kegiatan atau aksi yang telah dilakukan, bertujuan untuk mendapatkan bahan atau materi

penyempurnaan untuk kegiatan berikutnya.

E. Strategi untuk Memastikan Keberlanjutan FKPT

Strategi untuk memastikan keberlanjutan gerakan Kampung Panca Tertib, antara lain sebagai berikut.

1. Menertibkan peraturan walikota tentang gerakan kampung panca tertib.
2. Menertibkan peraturan daerah kota Yogyakarta yang mengakomodir gerakan kampung panca tertib.
3. Membentuk Forum Kampung Panca Tertib.
4. Membentuk koordinator FKPT dan pelopor ketertiban.
5. Melakukan pendampingan berkelanjutan melalui fasilitator FKPT dan duta ketertiban.
6. Mengalokasikan anggaran melalui APBD Kota Yogyakarta dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
7. Mengedepankan semangat menertibkan buku panduan FKPT.
8. Menyusun komitmen panca tertib dan rencana aksi di setiap Kampung Panca Tertib.
9. Melakukan pembekalan teknis keputusan fasilitator duta ketertiban dan pelopor ketertiban.
10. Melakukan kerja sama dengan akademisi korporasi OPD, praktisi, dan lembaga sosial lainnya.
11. Menyelenggarakan di panti *award.*

F. Kesimpulan

Kota Yogyakarta telah mencanangkan inovasi kampung penertiban (gerakan Kampung Panca Tertib) sejak tahun 2015. Inovasi ini semakin diminati dan mendapat tempat di hati warga masyarakat Kota Yogyakarta. Awal direncanakan inovasi pada tahun 2015 terdapat 5 kampung sebagai *pilot project*. Sampai dengan tahun 2021 terdapat 103 kampung yang telah mendeklarasikan sebagai Kampung Panca Tertib dari 170 kampung yang ada di Kota Yogyakarta pada tahun 2021, inovasi Kampung Panca Tertib berhasil menempati puncak prestasi tertinggi nasional sebagai top 45 inovasi terpuji pada ajang kompetensi inovasi

pelayanan publik pada tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Gerakan Kampung Panca Tertib *Lesson learning*-nya. Gerakan Kampung Panca Tertib ini dapat menjadi inspirasi daerah lain dalam memberdayakan masyarakat, menciptakan, dan mengubah pola sikap serta perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib, nyaman, dan bersih.

Daftar Pustaka

Irwan. (2018). *Dinamika dan Perubahan Sosial pada Komunitas Lokal*. Yogyakarta: Deepublish.

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (2017). *Laporan Sistemik review Tentang Potensi Maladministrasi dalam Penyelenggaraan Layanan Parkir di Kawasan Wisata Kota Yogyakarta*. Jakarta.: Ombudsman Republik Indonesia.

Perda Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017

Perda Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2018

Perda Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009

Perda Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002

Soffania, M. I. (2019). Hubungan *Aggressive Driving Behavior* Pengemudi Sepeda Motor Dengan Kecelakaan Lalu Lintas Studi Pada Siswa SMA Di Kabupaten Sidoarjo). *The Indonesian Journal of Public Health,*13(2), 222.

INOVASI KAMPUNG SAYUR KOTA YOGYAKARTA

Bela Novia Astuti, Nugroho Dwisatria Semesta, Nia Ambarwati,Apriliyani, dan Ananda Fikri Sulistyo

1. Ketahanan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan paling mendasar bagi manusia. Dalam lingkup global, masing-masing negara pun mulai berlomba-lomba dalam upaya peningkatan ketahanan pangan. Mengingat semakin minimnya lahan pertanian yang berbanding terbalik dengan besarnya kebutuhan pangan dari manusia sendiri. Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi masyarakat rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan bahan baku, baik jumlah maupun mutunya terjamin, aman, merata, serta terjangkau. Pentingnya peningkatan ketahanan pangan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan sebagai pemenuhan kebutuhan yang paling dasar bagi manusia.

Tidak terlepas di Indonesia sebagai negara agraris yang kaya akan ketersediaan pangan dan rempah beraneka ragam. Sebagai negara agraris, sektor pertanian memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan di suatu negara dikarenakan hampir seluruh kegiatan perekonomian di Indonesia bergantung pada sektor pertanian.

Pangan yang merupakan aspek penting dalam kehidupan tentunya berperan sangat besar dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Fauzi (2016), ialah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, baik berupa olahan maupun bukan olahan, dan segala kebutuhan sebagai sumber makanan.

Akan tetapi, sampai saat ini kondisi pertanian di Indonesia tergolong tidak stabil dan para petani banyak yang belum sejahtera. Tidak sedikit petani di Indonesia yang masih termasuk dalam zona kemiskinan di tengah jasa besarnya menopang kebutuhan pangan. Oleh karenanya, sangat penting untuk melakukan upaya

pembangunan pertanian dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring dengan perubahan iklim, alih fungsi lahan, penurunan kualitas sumber daya genetik, dan pemanasan global, sedangkan seperti diketahui bersama bahwa sampai kapan pun dan bagaimana pun manusia akan selalu membutuhkan pangan untuk tetap bertahan hidup.

Terlepas dari konteks pertanian yang menunjang ketahanan pangan nasional, terdapat pula ketahanan pangan rumah tangga yang dianalisis dari ketersediaan pangan, stabilitas pangan, aksesibilitas, keterjangkauan terhadap pangan, kualitas, keamanan pangan, hingga strategi adaptasi terhadap ketahanan pangan itu sendiri. Hasil penelitian dari (Nurjannah et al., 2021) disebutkan bahwa ketahanan pangan rumah tangga di Indonesia masih tergolong rentan dan ada pula sedikit wilayah yang mengalami kesulitan pangan pada saat musim tertentu. Kondisi iklim dan cuaca tentunya menjadi aspek penentu pula bagi keberhasilan panen, dan hal ini sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan pada satu kali musim panen.

Yogyakarta sebagai Kota Pelajar dan penduduknya yang padat dituntut dapat mengupayakan ketahanan pangannya di tengah minimnya lahan pertanian. Selain itu, persoalan terkait lingkungan hidup dan terbatasnya lahan hijau yang tidak lain untuk mencukupi lahan pemukiman adalah dampak dari kepadatan penduduk. Karenanya dibutuhkan solusi untuk mengatasi permasalahan melalui kebijakan dan tindakan nyata untuk menjaga kelestarian lingkungan dan dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Persoalan penurunan ketersediaan pangan tentunya akan berpengaruh pada kecukupan angka gizi masyarakat.

Penurunan ketersediaan pangan yang disebabkan lahan pertanian berkurang. Namun, pemenuhan kebutuhan akan pangan semakin meningkat sehingga dibutuhkan adanya sebuah solusi. Upaya dari solusi tersebut adalah dengan adanya program kemasyarakatan berupa kampung sayur, yaitu melalui pemanfaatan pekarangan rumah untuk ditanami berbagai macam tanaman sayur yang dapat menjaga kualitas lingkungan sekaligus memenuhi

kebutuhan pangan keluarga. Program kampung sayur dapat dilakukan oleh masyarakat perkotaan secara bersama-sama sehingga dapat menumbuhkan sikap gotong-royong, toleransi, dan kerukunan antar warga. Hal ini merupakan satu upaya yang membuahkan banyak hasil sekaligus. Pekarangan rumah memiliki fungsi multiguna karena dari lahan yang relatif sempit dapat menghasilkan bahan pangan seperti umbi-umbian, sayuran, buah-buahan, bahan tanaman rempah, dan obat. Pemanfaatan pekarangan menjadi lebih bermakna ketika didukung oleh partisipasi masyarakat sekitar. Hal serupa telah diterapkan di beberapa wilayah perkotaan yang bahkan notabenenya hanya memiliki lahan sempit. Di Kemantren Tegalrejo, Kelurahan Kricak, tepatnya Kampung Jatimulyo telah mengembangkan program kampung sayur yang telah didirikan sejak tahun 2016 silam. Hal ini merupakan upaya dalam mendukung ketahanan pangan yang dilakukan oleh masyakat dan sempat dibina pula oleh pihak terkait sehingga Kampung Sayur Kelompok Tani Dewasa (KTD) Ngremboko dapat bertahan eksis hingga saat ini. Program ini bahkan diagendakan oleh pemerintah setempat untuk mendukung penanganan *stunting*. Kondisi perekonomian akibat pandemi Covid-19, memicu pendapatan rendah dan tingkat konsumsi ibu hamil akan berkurang seiring dengan rendahnya pendapatan. Berdasarkan latar belakang di atas, menarik untuk dikaji inovasi apa saja yang dilakukan di Kampung Sayur Kricak dalam menunjang penanganan *stunting*?

2. Kampung Sayur Kelompok Tani Dewasa(KTD) Ngremboko

Kelompok Tani Dewasa (KTD) Ngremboko yang beralamat di Kampung Jatimulyo, RT 11, RW 03, Kelurahan Kricak, Kemantren Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kelompok Tani Dewasa (KTD) "Ngremboko" ini merupakan organisasi pertanian yang meliputi kegiatan masyarakat Kampung Jatimulyo. Kegiatan yang biasa dilakukan meliputi pemanfaatan lahan dan pekarangan dengan konsep Kampung Sayur dengan tanaman berupa sayuran dan buah. Kegiatan mengolah hasil dari

bertani dan bercocok tanam secara terus menerus di kebun bibit yang memiliki luas 600m^2 sebagai rumah produksi berbagai jenis bibit sayuran dalamartian menyemai sendiri, ke depannya kegiatan kampung sayur ini akan berkembang menjadi satu kawasan pertanian terpadu (pertanian, peternakan, dan perikanan agribisnisnya). Mengingat akan kondisi lahan di perkotaan yang sangat sempit, hal tersebut merupakan persoalan pokok nasional dan permasalahan yang paling mendasar.

Terdapat beberapa permasalahan yang dialami oleh petani kota adalah kurangnya akses terhadap sumber modal, seperti lahan, pasar teknologi, serta organisasi kelompok tani. Adanya permasalahan dengan seiringnya waktu terus bermunculan, maka para petani di Kelurahan Kricak bersama kelompok tani untuk menciptakan pertanian konvensional yang agraris. Guna mewujudkan hal tersebut membutuhkan usaha yang sangat besar dan tidaklah mudah. Dibutuhkan anggota atau tim yang memiliki solidaritas tinggi dan berkomitmen untuk memperjuangkan aspek kebutuhan seorang petani. Adanya hal tersebut ditambah pengelompokan masyarakat petani yang dengan sukarela bertukar informasi dan hubungan yang baik menjadikan organisasi mempunyai sebuah kekuatan, ide, dan pemikiran guna mencapai tujuan.

Khususnya kelompok tani di Kelurahan Kricak pada umumnya petani yang berada di wilayah perkotaan atau petani yang memiliki kendala lahan yang sempit. Melalui pihak lain yang berkaitan lebih memprioritaskan diri sebagai sumber pendapatan manusia yang berkualitas, maka dengan demikian akan terwujud petani kota yang memiliki potensi yang handal, baik dari segi pemanfaatan atau pengolahan lahan bahkan sampai pengolahan hasil. Petani perkotaan dapat bersaing dalam menciptakan usaha dibandingkan pertanian beserta produk- produk yang memiliki nilai jual.

3. Profil Kelompok Tani Dewasa Ngremboko

Kelompok Tani Dewasa (KTD)Ngremboko berdiri pada tanggal 15 Desember 2018 dengan jumlah anggota awal sebanyak 48

orang, sekarang jumlah anggota aktif sebanyak 20 orang sesuai dengan keahlian masing-masing. Terdapat beberapa alasan pendirian kelompok tani ini adalah adanya lahan kosong yang tidak digunakan serta terdapat warga yang memiliki hobi di bidang pertanian. Dengan tujuan dapat menghasilkan sebuah usaha yang bisa menopang kesejahteraan perekonomian rumah tangga. Setelah beberapa tahun berdiri, kelompok tani ini telah mengembangkan program, baik yang lahir dari kelompok tani sendiri maupun program yang bekerja sama dengan pihak lain.

Maksud pendirian kelompok ini adalah untuk memperkenalkan Kelompok Tani Dewasa (KTD) Ngremboko kepada masyarakat Kota Yogyakarta. Dengan tujuan sebagai acuan kegiatan masyarakat yang secara transparansi mengenai bermacam kegiatan di bidang pertanian dan pengembangan usaha agribisnis ditingkat perdesaan untuk pertumbuhan ekonomi produktif, yaitu:

- mendukung program pemerintah dalam menyukseskan ketahanan pangan yang berbasis ekonomi produktif masyarakat;
- menambah penghasilan anggota keluarga kelompok tani menuju sejahtera;
- memperindah lingkungan dengan banyak tanaman; dan
- meningkatkan kesejahteraan hidup para anggota kelompok tani.

Sasaran dari Kelompok Tani Dewasa (KTD) Ngremboko ini adalah bapak-bapak dan ibu-ibu serta masyarakat Kelurahan Kricak dengan slogan "hidup di kota suasana seperti di desa". Kegiatan yang dilaksanakan di antaranya adalah pertama, pertemuan rutin setiap bulan dengan mengundang PPL untuk mendapatkan bimbingan penyuluhan. Kedua, pengembangan kawasan Kampung Sayur dengan konsep pertanian yang berlokasi di wilayah RT 11 RW 03. Terdapat beberapa permasalahan yang menjadi suatu penghambat dalam menjalankan kelompok tani ini. Pertama, belum adanya sarana untuk pengairan.

Kedua, sumber dana masih terbatas. Ketiga, masih belum banyak warga yang sadar akan pentingnya manfaat pekarangan untuk dimanfaatkan secara maksimal. Terakhir, kegiatan berkebun sering terbentur dengan kegiatan lain.

Susunan Pengurus Kelompok Tani Dewasa Ngremboko

Ketua I	: Sadiran
Ketua II	: Abdul Rachman
Sekretaris I	: Kristin Nugraheni
Sekretaris II	: Candra Rahining
Bendahara I	: Dian Nuraeni
Bendahara II	: Siti Choiriyah

4. Inovasi Kelompok Tani Dewasa Ngremboko

(A) Zero Kimia

Maksudnya adalah pemberian pupuk terhadap tanaman tanpa menggunakan bahan-bahan yang mengandung bahan kimia. Buah dan sayuran yang dihasilkan dari pupuk zero kimia akan lebih sehat ketika dikonsumsi dan bisa dikonsumsi secara langsung tanpa harus dicuci terlebih dahulu.

(B) Penjualan Tanaman dengan Metode Siap Rawat

Dalam menerapkan metode siap rawat berarti menjual sayuran beserta dengan media tanamnya sehingga seorang pembeli akan mendapatkan kemudahan dalam merawat sayuran agar dapat langsung dinikmati hasilnya tanpa harus merawat dari nol.

(C) Kelompok Tani Dewasa (KTD) Ngremboko menjalankan beberapa minat usaha yang termasuk dalam minat usaha, meliputi magot lele, ikan nila, ayam kampung, dan telur.

(D) Tempat *plotting* tanaman berupa sayur menyebar di sekitar rumah anggota maupun warga.

Anggota yang ikut serta atau masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar Kelompok Tani Dewasa (KTD) Ngremboko akan merawat tanaman secara mandiri di halaman rumah masing-masing. Agar semakin tumbuh jiwa bertani di setiap diri masing-masing.

(E) Menggunakan Sistem Tumpang Sari

Dalam media tanam yang sudah berisi tanaman akan ditumpang sari atau ditambahi tanaman lain dengan memperkirakan waktu penambahan. Contohnya: media tanaman ketela rambat di tumpang sari dengan tanaman tomat.

(F) Efisiensi dalam Penggunaan Lahan

Dalam penggunaan lahan ini dengan melakukan padat tanaman. Jika terdapat *space* lahan kosong maka segera dilakukan penanaman bibit baru.

(G) Produksi Pupuk Sendiri

Pupuk yang dimaksud adalah pupuk cair dan pupuk padat. Pupuk cair dibuat melalui pelatihan-pelatihan terlebih dahulu, sedangkan pupuk padat diperoleh dari hasil minat usaha ternak ayam.

(H) Sebagai Upaya Eduwisata

Kelompok Tani Dewasa (KTD) Ngremboko dapat dijadikan sebagai tempat eduwisata dibuktikan dengan banyaknya mahasiswa atau wisatawan berdatangan seiring dengan berjalannya waktu, dengan tujuan yang berbeda-beda.

Gambar 1 Salah satu sudut kampung sayur, Kricak
Sumber: https://i0.wp.com/jogjadaily.com/wp-content/uploads/2021/11/KTD-Ngremboko-scaled.jpeg?ssl=1

1. Jenis-jenis Tanaman

Kebun Kelompok Tani Dewasa (KTD) Ngremboko menanam berbagai jenis tanaman sayuran dan buah-buahan yang beraneka ragam, sebagai berikut.

Tabel 1.1
Jenis Tanaman dan Jumlahnya

NO	Jenis Tanaman	Jumlah
1	Terong *(Solanum melongena)*	39
2	Tomat *(Lycopersicum esculentum Mill)*	94
3	Jambu Air *(Syzygium aqueum)*	28
4	Jambu Biji *(Psidium guajava)*	12
5	Ketela rambat *(Ipomoea batatas)*	94
6	Pepaya *(Carica papaya)*	5
7	Lemon *(Citrus limon)*	10
8	Kelengkeng *(Dimocarpus longan)*	5
9	Kacang Tanah *(Arachis hypogaea)*	75
10	Cabai *(Capsicum frutescens)*	33
11	Alpukat *(Persea americana)*	3
12	Bayam *(Amaranthus)*	3
13	Mangga *(Mangifera indica)*	3
14	Pisang *(Musa paradisiaca)*	15
15	Sawo *(Manilkara zapota)*	8
16	Jahe *(Zingiber officinale)*	29
17	Belimbing *(Averrhoa carambola)*	3
18	Leci *(Litchi chinensis)*	4
19	Serai *(Cymbopogon citratus)*	1
20	Kunyit *(Curcuma longa)*	1
21	Ginseng Jawa *(Talinum paniculatum)*	4
22	Anggur *(Vitis vinitera)*	2
23	Sirsak *(Annona muricatta)*	4
24	Pandan wangi *(Pandanus amaryllifolius)*	4
25	Sawi *(Brassica juncea L)*	2
26	Kangkung *(Ipomoea aquatica)*	31
27	Kepel *(Stelechocarpus burahol)*	3
28	Tin *(Ficus carica)*	1
29	Ketela Pohon *(Manihoot esculenta)*	12

Dari tabel 1.1 tampak bahwa kacang tanah *(Arachis hypogaea),* kangkung *(Ipomoea aquatica),* dan cabai *(Capsicum frutescens)* merupakan tanaman sayur dengan jumlah yang mendominasi saat dilakukannya pengamatan. Sayur-sayuran tersebut sedang

ditunggu untuk siap panen yang selanjutnya akan dibagikan kepada warga secara gratis.

2. Kampung Sayur sebagai Pendukung Pengentasan *Stunting* di Wilayah Kricak

Stunting dapat digambarkan merupakan kondisi gagal berkembang atau tumbuh pada anak usia balita atau di fase bayi di bawah kurang dari lima tahun yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronissehingga berdampak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi tersebut terjadisejak bayi dalam masa kandungan sampai pada masa awal setelah bayi lahir. Namun, kondisi *stunting* ini mulai tampak setelah bayi genap berusia dua tahun. Penderita *stunting* disebabkan oleh faktor multidimensi dan tidak hanya itu, penyebabnya juga dipengaruhi oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil ataupun anak balita. (Putri et al., 2020).

Penyebab *stunting*dari faktor multidimensi, yaitu di antaranya praktik pada pengasuhan gizi yang kurang baik atau masih minim, termasuk kurangnya pengetahuan ibu tentang kesehatan sertagizi pada sebelum dan sesudah waktu kehamilan. Berdasarkan beberapa informasi memperlihatkan bahwasanya22,8% pada anak usia 0-16 bulan yang *stunting* menyusu eksklusif dan hanya 36,6% pada anak usia 7-23 bulan yang mendapatkan makanan pendamping ASI dengan sesuai prosedural praktik yang telah disarankan dalam mengenai peraturan waktu, frekuensi, serta kualitasnya. Balita mengalami *stunting* akan berdampak memiliki tingkat kecerdasan kurang maksimal sehingga menyebabkan rentan pada berbagai macam penyakit, dan pada masa dewasa akan mengalami risiko menurunnya tingkat produktivitas. Hal ini, akan menghambat pertumbuhan ekonomi serta melonjaknya kemiskinan. (Yozalita et al., 2021).

Mengkutip dari berita parapuan (Faradila, 2022), ciri-ciri *stunting* pada anak yang terjadi di Indonesia selain dari tubuh yang berbadan pendek dari usianya ada juga penyebab lainnya, yaitu antara lain wajahnya keliatan lebih muda daripada anak-anak

seusianya, berat badan pada usia balita tidak mengalami kenaikan atau rendah bila dibandingkan dengan anak seusianya, perkembangan tulangnya tertunda dikarenakan tidak terpenuhinya kebutuhan akan nutrisi pada anak, telat menstruasi pertama pada anak perempuan, anak lebih mudah diserang oleh berbagai penyakit infeksi. Oleh karena itu, jika anak-anak mengalami hal tersebut harus segera ditangani atau dirujuk ke dokter karena hal tersebut ciri-ciri dari *stunting.*

Menurut Intervensi yang paling tepat ditentukan dari mengurangi prevalensi *stunting* yang dilakukan 1000 Hari Pertama Kelahiran. Periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) adalah simpul kritis pada awal terjadinya perkembangan *stunting,* yang sebaliknya memiliki dampak jangka panjang hingga mengalami keberulangan dalam siklus kehidupan. Kurang gizi sebagai penyebab langsung yang utamanya pada masa balita akan berdampak jangka pendek, yaitu menaiknya morbiditas. Jika masalah itu bersifat kronis, akan menyebabkan fungsi kognitif, yaitu tingkat kecerdasan mengalami penurunan atau rendah serta mengalami dampak pada kualitas sumber daya manusia. Pada kondisi berulang atau dalam siklus kehidupan, anak mengalami kekurangan gizi pada fase awal kehidupan (periode 1000 HPK) dan memiliki potensi penyakit tidak menular di usia dewasa (Wahyuningsih et al., 2020).

Indonesia adalah sebuah negara berkembang yang masih memiliki banyak masalah atau dihadapkan kepada masalah gizi yang memberikan efek serius pada mutu sumber daya manusia (SDM) penerus generasi bangsa. Masalah gizi yang masih menjadi perbincangan hangat menjadi fokus utama oleh pemerintah sekarang untuk banyak prevalensi anak balita kerdil *(Stunted). Stunting* adalah masalah tingkat pertumbuhan yang memiliki pengaruh tinggi badan di usia balita (0-59 bulan) dengan mengakibatkan penyerapan asupan gizi yang masih terhambat pada jangka waktu yang relatif lama. Identifikasi balita yang disebut *stunting* berlandaskan pada indikator TB/U yang mengacu kepada standar baku pengukuran WHO pada hasil studi referensi

yang dilakukan di tahun 2005, di mana kategori pendek hasil pengukuran menampilkan <-2 SD dan <-3 SD pada anak dengan kategori sangat pendek (Mardihani& Husain, 2021).

Bersumber pada data hasil Riskesdas tahun 2018 menunjukkan prevalensi *stunting*, yaitu 30,8%. Menurut hasil penelitian Studi Status Gizi Balita di Indonesia tahun 2019 yang sudah terintegrasi Susenas di bulan Maret 2019, memperlihatkan prevalensi *stunting* mengalami penurunan menjadi 26,67%. Walaupun mengalami penurunan, angka *stunting* yang ada di Indonesia masih tinggi. Dengan demikian, masih perlu adanya upaya dalam menurunkan angka *stunting*. Menurut data Kesehatan DIY 2019, di tahun 2018 prevalensi *stunting* di Provinsi DIY berjumlah 12,37%. Namun, di tahun 2019 prevalensi *stunting* tersebut mengalami penurunan 10,69%. Di Kabupaten Kulon Progo, pada tahun 2018 adalah 14,31%. Namun, di tahun 2019 prevalensi *stunting* mengalami penurunan menjadi 13,62%. Kulon Progo berada di rangking kedua pada masalah *stunting* setelah Gunung Kidul (17,94%)

Upaya yang dilakukan Negara Indonesia untuk merentas kekurangan gizi atau yang sering disebut dengan *stunting* yang terjadi oleh para ibu serta bayi perlu dengan diadakannya program Pemberian Makanan Tambahan (PMT). PMT atau yang dimaksud Pemberian Makanan Tambahan, yaitu sebagai makanan tambahan, tetapi bukan sebagai pengganti makanan utama dalam kehidupan sehari-hari dan memiliki kandungan nilai gizi yang sesuai, seimbang, serta tepat sasaran. Tujuan pokok dari adanya pemberian makanan tambahan (PMT), yaitu untuk memperbaiki keadaan kekurangan gizi pada ibu serta bayi yang memiliki kekurangan gizi untuk mendapatkan sebuah gizi yang optimal (Rosyida et al., 2021).

Melansir dari berita (Adminwarta, 2021), peran yang dilakukan Kota Yogyakarta untuk mencegah *stunting,* yaitu dengan memberikan konseling gizi untuk calon pengantin, ibu hamil, serta ibu menyusui. Selain itu, juga diadakan kelas ibu pada tiap puskesmas, sosialisasi serta praktik Pemberian Makan Bayi dan

Anak (PMBA) di tiap wilayah. Optimalisasi kegiatan kelompok pendukung ibu dan optimalisasi kader yang sudah terlatih dalam pelatihan konseling Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) di Posyandu. Tidak kalah penting diadakan peluncuran program DASHAT di semua kampung KB se-DIY. DASHAT merupakan bentuk intervensi *stunting* dengan pemberian makanan yang bergizi seimbang pada ibu hamil dan keluarga yang terkena dampak dari *stunting,* maka upaya yang dilakukan, yaitu mengoptimalisasikan bahan pangan lokal dengan memadukan sumber daya maupun kontribusi dari mitra lainnya.

Kampung Sayur yang disebut dengan Kelompok Tani Dewasa (KTD) Ngremboko yang berada di Jatimulyo RT 11, RW 03, Kelurahan Kricak, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta turut berpartisipasi dalam pencegahan *stunting* dengan mengangkat tema "Mendukung Pengentasan *Stunting* di Wilayah Kricak". Perannya, yaitu dengan memberikan pelatihan tentang cara menanam sayur serta pemanfaatan barang-barang bekas, seperti galon bekas air mineral digunakan untuk wadah tanaman, kotoran hewan yang diolah menjadi pupuk, air hujan ditampung untuk menyiram di kala musim kemarau, dan masih banyak lagi. Pelatihannya dengan memberikan tanaman kepada para penderita *stunting* untuk mereka bisa menyayangi serta merawat tanaman dan tanaman tersebut diberikan secara gratis. Selain itu, juga didukung oleh beberapa sponsor, yaitu Sari Husada, SGM, Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Yogyakarta, dan sebagainya.

3. Neraca Perekonomian Warga Desa dengan Adanya Kampung Sayur

Bencana Covid-19 memengaruhi kondisi dalam kehidupan masyarakat di hampir 207 negara di dunia, hal tersebut juga dirasakan di Indonesia. Indonesia pertama kali mengalami kasus Covid-19 di awal bulan Maret sampai Mei 2020, tercatat 10.843 kasus penderita Covid-19 dengan jumlah meninggal 831 korban jiwa, terdapat 1.665 orang yang mengalami sembuh dari total

22.545 orang penderita masih dirawat. Menurut Gugus Tugas Covid-19 angka resmi yang telah diterbitkan secara harian memperlihatkan terjadinya kenaikan kasus korban yang mengalami Covid-19 yang sangat signifikan, terutama di periode minggu pertama pada bulan Mei 2020 yang mengalami kenaikan berkisar kurang lebih dari 150 sampai 400 kasus per harinya (Hadi, 2020).

Penyebaran Covid-19 yang melaju dengan sangat cepat juga menyebabkan pemerintah Indonesia untuk merespons dengan mengambil tindakan, yaitu dengan menerapkan sistem Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pemerintah mengeluarkan maklumat kebijakan untuk belajar, bekerja, serta beribadah di rumah. Kebijakan ini bertujuan untuk memutus penyebaran Covid-19 yang sedang terjadi. Dengan adanya wabah Covid-19 terjadinya peraturan yang bermacam-macam yang turut membuat masyarakat mengalami keresahan disebabkan pandemi ini serta berdampak pada seluruh aspek masyarakat dan berimbas dengan ketidakpastian di lapangan pekerjaan pada masa depan pascawabah Covid-19. Selain itu, krisis kesehatan serta ekonomi masih menjadi perhatian utama yang harus ditangani serta krisis pangan dan gizi yang mulai terdampak.

Berlandaskan pada berita DPRD DIY (2021), perekonomian yang terjadi di Kota Yogyakarta yang disebabkan oleh Covid-19 mengalami dampak yang besar, yaitu ada 5 dampak besar dengan adanya Covid-19. Dampak pertama yang dirasa, yaitu mudah sekali dilihat melemahnya konsumsi rumah tangga atau daya beli masyarakat secara luas. Dampak yang kedua adalah menurunnya angka investasi di berbagai sektor usaha. Untuk dampak yang ketiga, yaitu melemahnya ekonomi daerah dan nasional. Dampak yang keempat terjadinya pergeseran pola bisnis serta penerapan bisnis model yang tidak seperti biasa. Sedangkan, dampak yang terakhir yang cukup signifikan adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Penanganan Covid-19 yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta dengan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi

terkait penanganan Covid-19 supaya lebih mudah teratasi serta masyarakat mampu beradaptasi pada situasi yang ada. Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melawan Covid-19, yaitu dengan memberikan pencegahan serta pemulihan ekonomi. Pencegahan yang dilakukan dengan memberikan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat tentang pandemi Covid-19. Pemerintah juga memperketat protokol kesehatan dalam mendisplinkan masyarakat dengan menerapkan 4 M, yaitu memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir, menjaga jarak, serta menghindari kerumunan. Selain itu, pencegahan, juga diterapkan dengan mengumpulkan data mobilitas masyarakat pada tempat umum dengan memindai kode QR, memberitahukan perkembangan Covid-19 di Kota Yogyakarta, dan sebagainya (Shidqiyyah, 2020).

Pemulihan ekonomi yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta di sektor pertanian dengan mengadakan program bertani di tengah Kota Yogyakarta dengan tujuan untuk memberikan fasilitas warga maupun kelompok yang ingin belajar dalam bercocok tanam dan hal tersebut meningkatkan perekonomian dari hasil panen di kebun serta memanfaatkan lahan kosong. Tujuannya untuk memberdayakan serta meningkatkan kapasitas masyarakat tidak mampu untuk membantu memberikan tambahan penghasilan dan kesejahteraan melalui pertanian yang terintegritas. Program bertani di Kota Yogyakarta membuat masyarakat turut mendapatkan pendampingan serta pengarahan dan edukasi guna meningkatkan pengetahuan dalam bertani yang melibatkan sekelompok orang.

Kampung Sayur di perkotaan yang ada di Yogyakarta dipelopori oleh Kelompok Tani Dewasa Ngremboko, Kelurahan Kricak, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta. Kelompok Tani Dewasa (KTD) Ngremboko merupakan kegiatan menanam tanaman dengan melakukan aktivitas ketika mempunyai waktu luang di luar pekerjaan. Aktivitas menanam berbagai tanaman sangat bermanfaat bagi kelompok tani Kelurahan Kricak. Selain itu, terdapat nilai ekonominya yang dihasilkan atau dirasakan oleh

masyarakat lokal maupun luar. Hasil dari bertani menguntungkan apabila memasuki musim panen karena dapat dijual, tetapi selain itu juga kelompok tani Kelurahan Kricak memberikan gratis kepada masyarakat sekitar dan anggota yang telah berpartisipasi untuk menikmatinya serta bertujuan untuk menghemat anggaran kebutuhan sehari-hari belanja rumah tangga yang berupa makanan pokok, seperti cabe, tomat, dan sebagainya.

Inovasi dari Kelompok Tani Dewasa (KTD) Ngremboko, yaitu dengan memanfaatkan media bekas yang berpengaruh terhadap penghematan anggaran untuk pembelian bahan, seperti media air hujan dengan memberikan wadah untuk menampung air hujan, galon bekas air mineral untuk tempat menanam tanaman, dan rak sebagai tempat tanaman. Dalam setiap bulan Kelompok Tani Dewasa (KTD) Ngremboko menghasilkan panen kebun, seperti sayuran, ikan, ayam, dan telur. Panen yang dihasilkan dari Kelompok Tani Dewasa (KTD) Ngremboko sangat dimanfaatkan masyarakat sekitar. Selain itu, Kelompok Tani Dewasa (KTD) Ngremboko menjalin kerja sama dengan angkringan yang berdiri sejak awal tahun 2020 di depan kebun. Kelompok Tani Dewasa Ngremboko turut mendapatkan bahan, seperti ketela pohon, jagung yang merupakan hasil dari kebun, dan sebagainya.

Kelompok Tani Dewasa (KTD) Ngremboko pada masa pandemi Covid-19 membantu warga sekitar Kelurahan Kricak. Dengan adanya Kampung Sayur, masyarakat yang mengalami PHK sehingga menyebabkan krisis pangan atau kekurangan kebutuhan pokok sehari-hari dapat memperoleh bantuan berupa sayuran, seperti cabe, tomat, jagung, dan sebagainya. Melansir dari berita mediaindonesia.com (Hardi, 2020), Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, Sugeng Darmanto, memberikan bantuan berupa bibit kepada 19 kelompok tani yang tersebar di 14 Kecamatan di Kota Yogyakarta, salah satunya Kelompok Tani Dewasa (KTD) Ngremboko. Masing-masing kelompok tani memperoleh 1 krat bibit cabe serta terong yang berisi sekitar 400 bibit, benih sayuran gambas serta labu, dan media tanam. Dengan

harapannya untuk Kampung Sayur dan lorong sayur bisa tetap produktif.

Penghasilan Kelompok Tani Dewasa (KTD) Ngremboko berkisar sejumlah Rp200.000,00 – Rp300.000,00/bulan. Perolehan penghasilan diperoleh dari penjualan hasil panen sayur dan tanaman yang sudah berbuah, tidak hanya menjual tanaman, tetapi Kelompok Tani Dewasa Ngremboko turut bertanggung jawab apabila tanaman pembeli mati, kecuali tidak dirawat. Dari tanaman yang pembeli terima saat sudah mati, maka Kelompok Tani Dewasa (KTD) Ngremboko mengganti tanaman tersebut dan turut memberikan edukasi cara merawat tanaman, mereka berharap pembeli bisa menyayangi tanaman mereka agar dapat menghasilkan sayur untuk dikonsumsi yang dapat menghemat uang belanja. Harga hasil panen Kelompok Tani Dewasa Ngremboko sebagai berikut.

Tabel 1.2
Harga Hasil Panen Kelompok Tani Dewasa (KTD) Ngremboko

No	Hasil Panen	Harga
1	Tomat	Rp. 6.000/kg
2	Terung	Rp. 10.000/kg
3	Telur Ayam Kampung	Rp. 1.500/butir
4	Cabai Rawit	Rp. 75.000/kg
5	Sawi	Rp. 7.500/ikat
6	Bayam	Rp 3.000/ikat
7	Kacang Tanah	Rp. 11.000/kg
8	Pepaya	Rp. 6.500/kg
9	Ketela Rambat	Rp. 8.000/kg
10	TanamanTomat	Rp. 25.000
11	TanamanTerong	Rp. 30.000
12	Tanaman Cabai	Rp. 35.000

Berdasarkan Tabel 1.2 dominasi harga diduduki oleh cabai rawit dengan harga Rp 75.000,00/kg dan penjualan tanamancabai seharga Rp35.000,00/tanaman. Diikuti pohon terong seharga

Rp30.000,00/tanaman, tomat seharga Rp. 25.000,00/tanaman, dan seterusnya hingga yang termurah telur ayam kampung dengan harga Rp1.500,00/butir.

4. Kesimpulan

Kesimpulan dari Program Kampung Sayur yaitu sebagai berikut.

1. Krisis ekonomi 2020 yang disebabkan oleh Covid-19 menjadikan berimbasnya keterpurukan berbagai sektor terutama di sektor pertanian, menjadi permasalahan pokok yang terjadi di Indonesia. Sektor pertanian pada masa pandemi mengalami krisis pangan dikarenakan inflasi yang tinggi. Tingginya inflasi menyebabkan bahan pokok, seperti cabai, tomat, terong, dan sebagainya mengalami stok yang minim.
2. Pemerintah Kota Yogyakarta membuat program Kampung Sayur yang dimulai dari Kampung Jatimulyo, RT 11, RW 03, Kelurahan Kricak, KecamatanTegalrejo, Kota Yogyakarta. Selain kegiatan bertani, kelompok Tani Dewasa (KTD) Ngremboko memanfaatkan sisa lahan dengan berternak ayam kampung, ikan, dan maggot (untuk pakan ternak). Hasil panen menjadi nilai produk yang bermanfaat dan memiliki nilai jual.
3. Kelompok Tani Dewasa (KTD) Ngremboko berkolaborasi dengan Sari Husada, SGM, dan Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Yogyakarta untuk mendukung pengentasan *stunting* di wilayah Kricak. Bertujuan untuk memberi penyuluhan, pendampingan, dan edukasi untuk menanam sayuran. Karena menjadi masalah yang memprihatinkan kepada anak usia dini. Kelompok Tani Dewasa (KTD) Ngremboko berharap dengan adanya program ini membantu kegiatan dalam menuntaskan *stunting* dengan cara mencintai tanaman.
4. Kelompok Tani Dewasa (KTD) Ngremboko melakukan hal tersebut untuk bertujuan menstabilkan harga pangan dengan menjual harga di bawah harga pasaran dan memberikan hasil panen secara gratis pada warga sekitar untuk menghemat

anggaran belanja bahan pokok. Selain itu, adanya Kampung Sayur memberikan dampak positif di berbagai sektor, antara lain (a) ekonomi, (b) pariwisata, (c) sosial, dan (d) tata ruang kota. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya program kampung sayur dapat diterapkan di kampung lainnya serta mendapatkan perhatian pemerintah Dinas Pertanian untuk mengedukasi masyarakat agar dapat bertani secara baik dan benar.

Daftar Pustaka

Adminwarta. (2021). *Cegah Risiko Stunting Pada Balita Lewat Program DASHAT*. Jogjakota.Go.Id.

DPRD DIY. (2021). *Dampak Besar Pandemi di Sektor Ekonomi*. Dprd- Diy.Go.Id.

Faradila, N. (2022). *Stunting Berdampak Pada Masa Depan Anak, Inilah 5 Ciri-cirinya*. Health.Grid.Id.

Fauzi, N. femi. (2016). *Partisipasi Anggota Kelompok Tani Dalam ProgramKampung Sayur Di Kota Yogyakarta*. 1–8.

Hadi, S. (2020). Pengurangan Risiko Pandemi Covid-19 Secara Partisipatif: Suatu Tinjauan Ketahanan Nasional terhadap Bencana. *The Indonesian Journal of Development Planning*, *4*(2), 177–190.https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.109

Hardi, A. T. (2020). *Kampung Sayur TetapProduktif di Tengah Pandemi*.Mediaindonesia.Com.

Nurjannah, S., Syarifuddin, S., & Yanuartati, B. Y. E. (2021). Kajian Kritis Terhadap Ketahanan Pangan Rumahtangga Dan Fenomena Stunting: Kasus Pada Dua Desa Di Kecamatan Gunungsari Kabupaten.

Putri, D. K., Herawati, T., Alfiasari, Riany,Y. E., Latifah, M., Hastuti, D., Johan, I. R., & Indro, M. N. (2020). Edukasi Keluarga Pengasuhan 1000 HPK untuk Pencengahan Stunting di Desa Cibatok 2. *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat*, *2*(1), 18–27.

JOGJA SMART SERVICE (JSS) PENUNJANG PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI YOGYAKARTA

Nabila Syaidatun Rahmawati, Ari Sona, Muhammad Sabri Ahmad, Natasya, Muhammad Fajar

A. Konsep *Smart City*

Dalam perwujudan *Smart City* bukan rahasia lagi bahwa kota-kota di seluruh dunia saat ini sedang bersaing ketat untuk menerapkan visi dari *Smart City* dalam pengelolaannya. Visi teknologi dari *Smart City* tentu dapat menarik investor teknologi perkotaan, yang pada akhirnya dapat menumbuhkan ketersediaan lapangan pekerjaan dan peningkatan ekonomi kota-kota besar internasional. Konsep *Smart City* juga gencar dilakukan di Indonesia, di mana implementasi *Smart City* harus melibatkan partisipasi masyarakat dari awal sehingga kesetaraan warga, pemerintah, swasta, serta akademisi dapat menghasilkan kota pintar, ada pula keterlibatan swasta tidak cuma mewujudkan kota yang *smart* saja, tetapi pula yang berkepanjangan. Kota mesti mendayagunakan modal serta kapasitas, dengan pengembangan kawasan serta pelaksanaan teknologi, serta menggerakkan masyarakat guna bersama meningkatkan kota.

Konsep *Smart City* ialah konsep kota berbasis ICT ataupun teknologi buat memesatkan pembangunan wilayah, spesialnya dalam pelayanan publik. Upaya mewujudkan kota pintar di Indonesia telah diawali dalam 3 tahun terakhir, sementara itu negeri lain telah jauh saat sebelum diterapkan (Yuli Tirtarinadi, 2019). Aplikasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta sendiri mengambil visi "Balaikota dunia maya" yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara *online* dan terpadu. Aplikasi ini juga dikelola oleh dinas-dinas terkait seperti Dinas Kominfo, Dinas Persandian, Dinas Kesehatan, dan lainnya. Yang mana memiliki tiga *platform* yang meliputi Pelayanan Publik, Pelayanan Pegawai, dan Informasi Publik. Ketiga

hal tersebut berisi tentang segala pelayanan Kota Yogyakarta yang dikelola oleh masing-masing dinas. Aplikasi JSS ini banyak memiliki dampak positif terlebih di masa pandemi dan *new normal* karena masyarakat tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan administrasi secara langsung maka dialihkan dengan aplikasi yang berbasis *online* ini agar dapat meminimalisir penyebaran Covid-19. Selain itu, aplikasi ini juga membantu masyarakat dalam menghemat waktu dan tenaga dalam pengambilan nomor antrian pendaftaran.

Menurut Penelitian, *Smart City* merupakan pengembangan kota yang lebih modern dan bisa memakai teknologi digital secara menyeluruh serta efektif. Didukung oleh *good governance, good people,* serta pelayan publik yang baik. Kedudukan otoritas publik dalam pengembangan kota-kota semacam itu sangat berarti, karena tindakan, keputusan, serta uraian tentang tanggung jawab mereka, bergantung pada dorongan serta integrasi proyek energi di tingkat perkotaan (Zamfir, 2019). Berangkat dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah adalah bagaimana pelaksanaan *Jogja Smart Service* dalam mendukung peningkatan pelayanan publik?

Sejarah Diterbitkannya Jogja *Smart Service (JSS)*

Jogja *Smart Service* mulai dibentuk pada tanggal 7 Juni 2018 yang memiliki tujuan untuk meningkatkan efisensi dan efektivitas pelayanan. JSS merupakan sebuah aplikasi yang diproduksi oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta yang peluncurannya dilakukan oleh Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, tepat pada hari jadi Pemkot Yogyakarta ke-71. Melalui JSS ini masyarakat cukup mengakses satu aplikasi untuk mengakses berbagai layanan yang dibutuhkan. JSS merupakan wadah dari tiap-tiap organisasi daerah mulai dari penyampaian informasi, pengaduan, pelayanan dan lainnya dapat diperoleh di aplikasi ini.

Fungsi Utama

*Gambar Menu Layanan Jogja Smart Servic*e

Fungsi utama dari aplikasi Jogja *Smart Service,* yaitu mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi serta pelayanan publik, perwujudan pemerintah dalam *E- Governance*, serta meningkatkan mutu dari pelayanan publik dengan menggunakan pemanfaatan teknologi informasi. Membagikan layanan serta data tanpa terdapat batas waktu serta tempat. Warga bisa mengakses data dan layanan tanpa wajib terikat batas waktu serta tempat. Serta komunikasi di dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah agar bisa terbentuk pemerintahan yang bersih, transparan, serta agar bisa untuk menjawab tuntutan perubahan dengan efektif. Sistem yang mutakhir, *e-gov* dinilai mampu menjawab tantangan pelayanan publik yang lebih transparan, akuntabel, efisien, serta terbebas dari praktik yang merugikan masyarakat.

Upaya Pemerintah Yogyakarta untuk Pengembangan JSS dalam Pengembangan *E- Government* di Era Pandemi

Pengembangan aplikasi JSS difokuskan pada pelayanan publik yang menyongsong E-*government*, Pemerintah Kota Yogyakarta mengupayakan strategi-strategi epic yang dapat ditempuh guna

memaksimalkan penggunaan aplikasi JSS. "Pihak kami sudah mengupayakan sosialisasi kepada warga lewat aktivitas di desa-desa ataupun kecamatan. Nantinya pihak Kominfo akan menjadi narasumber untuk kegiatan tersebut serta bertujuan untuk mengenalkan aplikasi JSS" (Wawancara dengan Chandra, Department Pengembangan dan Produksi Aplikasi JSS, 3 Juni 2022). Selain upaya pengenalan aplikasi kepada masyarakat secara langsung, Kominfo juga megupayakan penerapan *E-government* melalui fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi JSS tersebut.

Dengan adanya aplikasi ini masyarakat dapat mengakses berbagai informasi terkini Kota Yogyakarta, terkait informasi vaksin dan lowongan pekerjaan hanya dengan sekali klik. Tak hanya mendapatkan informasi terkini, aplikasi JSS juga mampu digunakan untuk pelayanan keadaan darurat, pengaduan masyarakat, kepengurusan surat-surat kependudukan, kegiatan pariwisata Kota Yogyakarta, dan lainnya. Masyarakat tak perlu takut tentang data kependudukan yang bocor dalam mengakses aplikasi ini karena Dinas Kominfo telah menjamin kebocoran data dan melakukan pengecekan secara berkala oleh bagian departemen persandian. Hal ini dirasa mampu memberikan pelayanan publik yang lebih *fleksible* dan tak terbatas, andal, dan terpercaya serta dapat diakses oleh masyarakat luas. Dengan demikian, penerapan *e- government* dapat berjalan dengan baik.

Perwujudan Aplikasi JSS untuk Menunjang Pelayanan Publik yang Lebih Baik

Keberadaan Jogja *Smart Service* (JSS) menjadi kebutuhan warga masyarakat Yogyakarta. Melalui aplikasi Jogja *Smart Service*, masyarakat bisa memperoleh berbagai layanan yang dibutuhkan karena aplikasi sudah berkolaborasi berbagai intansi yang berada di Kota Yogyakarta. Aplikasi JSS ini sudah dilengkapi mulai dari keluhan, perizinan hingga kegawat daruratan dan sangat membantu masyarat untuk mendapat informasi dan pelayanan publik.

Pada awal pembentukannya, berbagai upaya sosialisasi dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta. "Dalam upaya buat menyosialisasikan aplikasi JSS (Jogja *Smart Service*) kepada warga Pemerintah Kota Yogyakarta mengupayakan bermacam metode mulai dari mengadakan pertemuan di bermacam kelurahan dengan mengumpulkan perwakilan dari masyarakat untuk menyosialisasikan kepada warga masyarakat yang masih belum mengetahui aplikasi JSS". (Wawancara dengan Chandra, Department Pengembangan dan Produksi aplikasi JSS, 3 Juni 2022).

Implementasi teknologi yang diterapkan suatu wilayah merupakan sebagai interaksi kompleks di antara berbagai sistem yang ada di dalamnya. Di wilayah Kota Yogyakarta dalam menunjang wilayah untuk pembangunan kota yang *Smart City*. Pemerintah meluncurkan aplikasi Jogja *Smart Service* (JSS) yang bisa membangun tata kelola kota yang efisiensi dan baik. Implementasi aplikasi JSS sangat diterima dengan baik oleh masyarakat, "sehingga jumlah masyarakat yang menggunakan aplikasi JSS sebanyak 13150 masyarakat Kota Yogyakarta yang menggunakan aplikasi JSS dan 9167 non-Kota Yogyakarta yang menggunakan aplikasi JSS hingga saat ini". (Wawancara dengan Tri Puji, Department Pengembangan dan Produksi Aplikasi JSS, 3 Juni 2022).

Aplikasi JSS sangat membantu masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan publik sehingga kualitas pelayanan publik menjadi lebih baik. "Selama adanya aplikasi JSS Pemerintah Kota Yogyakarta merasa bahwa semakin banyak layanan yang terintegritas" (Wawancara dengan Chandra, Department Pengembangan dan Produksi Aplikasi JSS, 3 Juni 2022). Dalam penerapan aplikasi tersebut bisa mendorong pemerintah untuk mewujudkan *Government*. Implementasi aplikasi JSS dalam meningkatkan pelayanan publik berbasis sosio-kultural sudah bisa dikatakan meningkat aplikasi tersebut. Masyarakat sudah merasakan dampak dari pembangunan infrastuktur berbasis teknologi dan kepraktisan dari aplikasi Jogja *Smart Service*. Pemerintah Kota Yogyakarta khususnya Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Kota

Yogyakarta berperan aktif dalam meningkatkan kualitas aplikasi tersebut agar pelayanan publik terus semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pemerintah Kota Yogyakarta sangat mendukung dengan berbagai fasilitas penunjang, seperti penyediaan wifi 100 titik poin. Hal ini sangat membantu keberhasilan pelaksanaan aplikasi Jogja *Smart Service* (JSS) untuk digunakan masyarakat.

Sederet manfaat berkembangnya aplikasi Jogja *Smart Service*: membantu masyarakat dalam melakukan pengaduan kepada pemerintah, memudahkan pemerintah dalam menanggapi dan mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, memudahkan turis atau pendatang baru yang ingin berwisata di kota Yogyakarta, dan meningkatkan perekonomian masyarakat di sektor perdagangan dan pariwisata. Sebagai contoh, aplikasi *Jogja Smart Service* ini membantu masyarakat dalam pelayanan publik, seperti vaksinasi, *job fair,* dan administrasi. Melalui aplikasi JSS ini masyarakat bisa daftar secara *online,* tidak perlu datang secara langsung.

Namun, penerapan JSS tak luput dari berbagai penghambat, yaitu: masih kurangnya sosialisasi secara berkala di masyarakat, adanya ketakutan masyarakat atas kebocoran informasi pribadi, respons dari pemerintah yang dianggap masih kurang cepat, kurangnya sinergitas antar-Pemerintah kota Yogyakarta dan banyaknya masyarakat yang belum paham teknologi digital.

Kesimpulan

Jogja Smart Service (JSS) menjadi kebutuhan warga masyarakat Yogyakarta. Melalui aplikasi ini masyarakat bisa memperoleh berbagai layanan yang dibutuhkan karena di-*support* oleh instansi dan OPD terkait. Aplikasi JSS ini sudah dilengkapi mulai dari keluhan, perizinan hingga kegawatdaruratan dan membantu masyarakat untuk mendapat informasi dan pelayanan publik. Aplikasi ini banyak memiliki dampak positif terlebih di masa pandemi dan *new normal* karena pembatasan sosial, pelayanan yang semula o*ffline* bertransformasi menuju pelayanan *online.* Hal ini sebagai upaya mendekatkan ekspektasi publik juga untuk

meminimalkan penyebaran Covid-19. Selanjutnya, pengembangan aplikasi JSS difokuskan pada pelayanan publik guna menyongsong *E-government.*

Daftar Pustaka

Alfi Novariando, Eko Priyo Purnomo. 2020. Penertrasi digital untuk pembangunan berkelanjutan, Keberhasilan pelayanan E-Government Kota Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora* 4 (2).

Claudia Cicea, Corina Marinescu, Nicolae Pintilie. 2019. *Smart Cities Using Smart Energy: Integrating Modern Bioenergy in Consumption.* Theoretical and Empirical Researches in Urban Managemen.

El Anshori, Y. T. (2020). Smart City As An Implementation of E-Government in Indonesia. *JurnalTeori Dan Riset Administrasi Publik*, 3(2): 46-57.

Zamfir, Dumitru. 2019. Smart City and Resources Optimisation in Urban Communities. *Journal of US-China Public Administration* February vol. 16, No. 2: 45-55 doi: 10.17265/1548-6591/2019.02.002.

KELURAHAN TERBAN JUARA INOVASI DI DIY

Anastasia Hartini Hadia, Elam Dan Wenda, Mersiana Dali,
Natalia Betty Goo, Yemima Dikta Stefany

1. Konsep Penunjang *Smart City*

Populasi dunia terus bertumbuh seiring dengan urbanisasi yang semakin meningkat. Peningkatan ini menyebabkan kepadatan kota-kota besar di seluruh dunia. Akibatnya tantangan dalam pengelolaan kota pun semakin banyak. Untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk tersebut, beberapa negara melihat kebutuhan akan keberlanjutan lingkungan serta sosial dan ekonomi perlu ditingkatkan sehingga pengintegrasian teknologi dalam konsep *Smart City* pun dianggap menjadi salah satu solusi yang diperlukan. Penerapan konsep *Smart City* sendiri dinilai mampu membantu mengatasi masalah perkotaan seperti kesehatan dan keamanan. Laporan *McKinkey Global Institute* (MGI) menyebutkan bahwa penerapan konsep *Smart City* dapat meningkatkan beberapa indikator kualitas hidup utama, seperti kesehatan dan keamanan 10 hingga 20 persen. Teknologi yang diterapkan pada *Smart City* dapat membuat kota lebih efektif dan efisien. Hal ini semakin diperlukan data yang terhimpun dari berbagai perangkat IoT memungkinkan pemerintah untuk mengakses sejumlah informasi *(Big Data*) yang sebelumnya tidak tersedia. Data tersebut dapat ditindaklanjuti sebagai sebuah pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang lebih baik atau juga disebut *Decision Support System (DSS*).

Manfaat *Smart City* selanjutnya, yaitu membuat masyarakat menjadi lebih aman karena teknologi yang digunakan seperti *Intelligent Video Analytics* (IVA) membantu mengurangi aktivitas kriminal. Sederhananya, teknologi IVA dapat dengan mudah menangkap data seperti plat nomor, detektor benda tajam atau senjata hingga teknologi pengenal wajah bertujuan untuk menegakkan hukum. Ketika *Smart City* diterapkan, peralatan yang didukung teknologi tersebut akan meminimalkan tindak kriminal

pada suatu daerah.

Indonesia dengan jumlah penduduk sebanyak 276.534.274, menempati posisi keempat dalam daftar negara populasi paling banyak. Penduduk Indonesia ini setara dengan 3,51 persen dari total dunia mengakibatkan banyak fenomena yang terjadi di negara ini. Pemerintah menerapkan *Smart City* bertujuan untuk mempermudah pelayanan bagi seluruh masyarakat. Di Indonesia sendiri setidaknya sudah ada 8 kota yang menerapkan *Smart City*, yakni Jakarta, Semarang, Denpasar, Makassar, Yogyakarta, Surabaya, Banyuwangi, dan Bandung. Umumnya, *Smart City* memiliki 6 dimensi, yakni *Smart Economy, Smart Live, Smart Living, Smart People, Smart Mobility,* dan *Smart Governance*. Penelitian Supriyanta, Anggraini (2021) menunjukkan bahwa *Smart City* menopang perbaikan tata kelola pemerintahan dan kerja sama antarpelaku ekonomi daerah untuk mewujudkan pelayanan publik yang dikehendaki.

Di Kota Yogyakarta pemerintah menggunakan aplikasi pendukung agar masyarakat mudah mengakses semuanya melalui *online*. Aplikasi pemerintahan pada Kota Yogyakarta, yaitu *smart province jogja* istimewa di mana aplikasi ini digunakan agar menyediakan pelayanan informasi terintegrasi dan pemanfaatannya. Aplikasi ini juga digunakan untuk menciptakan "*smart and liveable city*" di Kota Yogyakarta. Aplikasi *Smart City* ini diluncurkan pada *mobile application* pada 7 Juni 2018 dengan nama *Jogja Smart City* (JSS).

Dalam aplikasi ini menggunakan konsep *Single ID, Single Window,* dan *Single Sign-On* SSO). Dengan menggunakan konsep ini mempermudah masyarakat karena dapat mengakses berbagai layanan publik melalui *online*. Tidak hanya aplikasi JSS saja, ada aplikasi yang dapat digunakan oleh masyarakat luar Yogyakarta, yaitu aplikasi "Jogja Istimewa". Dalam aplikasi ini mempermudah masyarakat luar Yogyakarta untuk mengetahui kondisi kota Yogyakarta. Mulai dari berbagai lokasi yang ada di daerah pengguna aplikasi, terdapat berbagai informasi wisata, dan lain sebagainya sehingga mempermudah masyarakat luar Yogyakarta

mengakses apapun di Yogyakarta dan membuat mereka nyaman.

(*Sumber:https://terbankel.jogjakota.go.i d/gallery/foto/MjM5MHAw*)

Rumusan masalah dalam tulisan ini, yaitu:

- Apa sajakah inovasi yang terdapat di Kelurahan Terban?
- Apa sajakah kendala pada saat pelaksanaan inovasi-inovasi tersebut?

2. Pelaksanaan *Smart City* di Gondokusuman

Penerapan *Smart City* di Kemantren Gondokusuman bisa dilihat dari pelayanan administrasi yang sudah digital dan semua keputusan-keputusan yang sudah diarsipkan dengan digital. Kegiatan pelayanan kepada masyarakat terlebih pada masa pandemi dilakukan secara *online* atau sudah menerapkan E-*Government*. Keunggulan dari hal ini, yaitu lebih mudah dan cepat. Hambatan dalam penerapannya, yaitu masih adanya masyarakat yang belum memiliki pemahaman dalam menggunakan gadget serta mahalnya pulsa paket data atau kuota internet.

3. Sejarah Kelurahan Terban

Kelurahan Terban adalah kelurahan yang terletak di sisi sebelah utara Kota Yogyakarta berbatasan dengan Desa Caturtunggal, Sleman, Yogyakarta. Ada 4 wilayah kampung di Kelurahan Terban, yaitu Kampung Purbonegaran, Kampung Sagan, Kampung Resonegaran, dan Kampung Terban. Adapun menurut riwayat dari para sesepuh bahwa nama Kampung Sagan yang ada

selama ini dulunya didiami sepasang suami istri bernama Ki Sag dan Nyi Sag (konon adalah sepasang prajurit Mataram) nama tersebut pada akhirnya sampai dengan saat ini dipergunakan untuk menamai kampung yang berada di sisi timur Kelurahan Terban, menjadi kampung Sagan (kebenaran tentang kampung tersebut masih dalam penelusuran). Adapun Makam Ki Sag dan Nyi Sag ada di Makam "Bendo" wilayah Kampung Sagan, begitu dituturkan oleh Sutopo, warga Kampung Sagan.

Kampung Purbonegaran yang terletak di sisi wilayah Timur (Timur Galeria) dulunya pernah didiami kerabat keraton bernama Purbonegoro, petilasan ndalem Purbonegaran sampai dengan saat ini belum bisa dilacak. Kampung Resonegaran, sebagaimana Kampung Purbonegaran dulunya didiami kerabat Keraton (Mataram) petilasannya pun juga belum bisa dilacak. Hanya perlu dicatat bahwa Kampung Purbonegaran mempunyai pasar rakyat di selatan Jl.Solo (sekarang Jl. Urip Sumohardjo) dan sekarang sudah bukan pasar lagi, tetapi menjadi pertokoan. Ketiga kampung tersebut (Purbonegaran, Sagan, Resonegaran) dulunya adalah satu RK (KK. LKMD) Purbonegaran, di bawah lingkup Kemantren (Red. Kecamatan Sekarang), warga menamakan ketiga wilayah tersebut dengan singkatan MASPUR (masyarakat Sagan, Purbonegaran, Resonegaran). Kampung Terban yang penduduknya padat belakangan dibandingkan dari ketiga wilayah tersebut, dulunya terdiri dari beberapa kampung. Salah satu contoh adalah RS.YAP di Jl.Cik Di Tiro dulunya bernama Kampung "Jeblokan". Adapun kampung Terban sendiri berada di sekitar Jl.C.Simanjuntak. Sebelah utara adalah Terbansari dan juga Blimbingsari (nama tersebut masih dipakai). Adapun wilayah Terban di sebelah utara jembatan Gondolayu sampai dengan perbatasan Blimbingsari dan Terbansari dulunya adalah berupa BONG (makam China), warga menamakan Kampung Terban dengan singkatan MASTER (masyarakat Terban).

4. Kelurahan Terban Juara 1Inovasi di DIY

Inovasi-inovasi yang terdapat di Kelurahan Terban ini mencakup dalam berbagai bidang. Seperti bidang pemerintahan,

ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Pada masa pandemi Covid-19 dalam bidang pemerintahan, Kelurahan Terban menerapkan *e-Government* guna mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Di bidang sosial, Kelurahan Terban memiliki sederet inovasi guna membantu warga yang terdampak Covid-19. Inovasi-inovasi tersebut di antaranya, "*Lemah Teles* Terban Tanggap Covid-19", yaitu bentuk sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan penularan Covid-19, melakukan penyemprotan disinfektan secara rutin. "*Pagar Rewang Tangga*", yaitu penyaluran bantuan bagi yang sedang menjalani isolasi mandiri dengan dicantelkan di pagar rumah. Inovasi selanjutnya, yaitu "Simbok Peduli", pemberian makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil untuk mengatasi *stunting* dan menekan kematian ibu hamil, program ini dilakukan oleh PKK Kelurahan Terban.

Di bidang pendidikan, Kelurahan Terban bekerja sama dengan tim Jogja Mengajar. Kegiatan yang dilakukan, yaitu melakukan pendampingan belajar untuk anak-anak. Inovasi ini dinamakan "Terban Cerdas". Dalam bidang budaya, Kelurahan Terban memiliki program latihan karawitan bagi anak muda, program ini sebelumnya telah vakum cukup lama dan sekarang telah dihidupkan kembali. Di bidang ekonomi, Kelurahan Terban fokus pada pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), ini juga sebagai upaya pengentasan kemiskinan serta inovasi dalam pelayanan publik.

Inovasi-inovasi di Kelurahan Terban didukung dengan potensi yang ada pada setiap kampungnya. Kampung Terban memiliki Batik Shibori, kerajinan dari daur ulang sampah, produksi air minum Nyess, ikan cupang, kuliner bakpia Erna, tanaman hias, dan kesenian jathilan. Kampung Sagan, kampung budaya, kuliner dan sayur, dengan potensi, seperti peternakan ramah lingkungan sapto asri, kebun herbal, batik Shibori, makanan dan kopi, serta terdapat pula bregodo Sagan. Kampung Purbonegaran, kampung budaya, sayur, dan herbal dengan potensi yang ada, yakni lingkungan bersih, jajanan tradisional, kampung hijau, sarana dan prasarana kebudayaan, serta terdapat kerajinan kayu. Kampung Resonegaran,

kampung budaya, kuliner dan *heritage* dengan potensi yang seperti wedang seruni dan nasi bakar, obat tradisional Calcusol, kerajinan batik klasik terbanan, kerajinan logam, serta di kampung Resonegaran ini juga terdapat museum sandi.

a. Kelurahan Terban Menerapkan *Good Governance* dalam Administrasi

Menerapkan *Good Governance* merupakan prasyarat dalam pembangunan administrasi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kewajaran, kesetaraan, dan implementasi pelayanan kepada masyarakat. Dalam administrasi pemerintahan Kelurahan Terban menerapkan sistem digitalisasi dalam pelayanan atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Di masa modern dengan berkembangnya Teknologi Informasi (TI) hari ini menjadi hal yang sangat signifikan. Dengan munculnya Teknologi Informasi sangat menggemparkan dunia karena teknologi informasi dapat masuk di segala sektor. Dalam pemerintahan dalam melakukan tugas dan tanggung jawab melayani masyarakat. Kelurahan Terban dalam administrasi mengarsipkan segala bentuk kegiatan dan pelayanan dalam bentuk digital. Di luar dari pada kantor kelurahan seperti hubungan dengan tingkat provinsi dan masayarakat, dan segala dokumen kemudian segala keputusan-keputusan lurah dari tahun 70-an hingga sekarang telah diarsipkan secara digital.

Hubungan kerja sama tiap RT/RW adminstrasi yang berbasis digital, dengan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat Terban. Kendala dalam komunikasi adalah kurangnya pemahaman dalam mengunakan *gadget* dan mahalnya pulsa paket data atau kuota internet, karena itu pertahun Kelurahan Terban memberikan paket pulsa data 5 GB 4 kali dalam setahun, ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam membangun koordinasi yang baik dan membaca potensi-potensi yang ada dalam lingkungan masyarakat Terban.

Dilihat dari sisi inovasi Pemerintah Kelurahan Terban memanfaatkan potensi yang ada, banyaknya produk buatan masyarakat dan antusias masyarakat dalam membangun

pemberdayaan kemajuan masyarakat setiap RT/RW dan bantuan dana dalam implementasi kegiatan masyarakat dapat terealisasikan dengan baik. Oleh karena itu, Pemerintah Kelurahan Terban memanfaatkan potensi dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM).

Dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM), Kelurahan Terban masing-masing RW di setiap wilayah, membangun tema yang menjadikan sebuah *branding* dengan melihat potensi atau keunggulan wilayah dalam menerapkan inovasi bagi masyarakat. Dalam hal ini pemerintah Kelurahan Terban melihat potensi yang dimiliki dan memberikan Sosialisasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

b. Wisata Nostalgia Kos-kosan

Rumah-rumah di kawasan Terban, beberapa di antaranya pernah menjadi tempat bersejarah tokoh-tokoh di tanah air di masa lalu. Hal ini menjadi menarik untuk ditawarkan sebagai wisata kos-kosan. Pihak kelurahan menawarkan wisata Nostalgia Koskosan, ini menjadi salah satu daya tarik pencitraan saat ini bagi petinggi negara, Bapak Presiden Joko Widodo, Mahfud MD, dan Andi Mallarangeng. Hal yang kemudian bisa menjadi daya tarik nostalgia ketika hidup berkuliah di Yogyakarta. Melihat dari sisi dunia maya media masa Indonesia merupakan pecinta sinetron ini menjadi salah satu daya tarik, ketika Bapak Presiden Joko Widodo, Mahfud MD, dan Andi Mallarangeng dipertontonkan sisi di mana saat hidup di kos-kosan ketika kuliah akan teringat kembali nostalgia saat mengalami suka maupun duka. Potensi wisata kos-kosan ini dapat dibidik dan dari sisi ekonomi akan mendatangkan keuntungan bagi masyarakat.

c. Pemberdayaan Budaya Seni Tradisional

Dengan melihat bahaya teknologi dan pengaruh globalisasi terhadap keberlangsungan kehidupan anak muda, dengan ini Kelurahan Terban melihat potensi atau bakat anak muda untuk membentuk inovasi kelompok-kelompok seni tradisional yang

dimiliki anak muda yang merupakan bakat turunan dari orang tua yang dimiliki dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan produktif seperti berlatih karawitan yang sebelumnya telah vakum cukup lama dan sekarang dihidupkan kembali. Tujuannya agar generasi muda tidak terpengaruh dengan kencangnya globalisasi saat ini, dan tetap cinta akan budaya sendiri. Setiap setahun sekali Kelurahan Terban mengadakan pentas seni. Hal ini juga sebagai upaya meningkatan ekonomi kreatif berbasis pariwisata budaya untuk pemberdayaan masyarakat.

Gambar 1 Kegiatan Masyarakat Didukung Elemen Masyarakat di Kelurahan Terban
Sumber: Website Kelurahan Terban, 2020.

Gambar 2 Kegiatan Kesenian di Kelurahan Terban
Sumber: Website Kelurahan Terban, 2020.

d. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Di kampung Terban ini terdapat 6 RW dengan potensi yang beranekaragam yang sudah memiliki nilai jual baik dengan mendatangkan wisatawan maupun bekerja sama dengan pengusaha lokal dan hotel. Kelurahan Terban membangun hubungan komunikasi dengan pihak luar, seperti pihak perhotelan. Kelurahan Terban telah mengirim 12 UMKM. Hal yang perlu diperhatikan inovasi UMKM masyarakat dalam membangun hubungan adalah produk yang dimiliki harus memiliki nilai estetika dan rasa yang baik. Dalam membangun hubungan yang baik dan saling menguntungkan kedua belah pihak UMKM masyarakat dan pihak perhotelan, hal ini telah membantu perkonomian masyarakat. Ada beberapa manfaat yang diterima masyarakat, sebagai berikut.

1. Mendapatkan kesempatan belajar bagaimana melayani konsumen dengan baik.
2. Mendapatkan kesempatan mengatur bagaimana cara mengatur dan tata cara penjualan dengan baik.
3. Memanajemen keuangan dengan baik sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

4. Tingkat perbandingan harga barang dari suatu *brand* yang dijual berbeda dengan harga pasaran di luar yang memberikan keuntungan lebih bagi masyarakat.

Ada 2 kemanfaatan yang dilihat dari sisi hasil alam yang kemudian dapat di produksi yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat Terban.

1. Industrialisasi Produk Jamu
   Dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat Kelurahan Terban membangun hubungan kerja sama dengan perusahaan membangun industri jamu dengan mengembangkan tanaman herbal dengan memanfaatkan lahan kosong milik warga yang semula tidak terawat. Ini menjadi satu hal produktif yang dapat dikembangkan masyarakat guna memberikan kemanfaatan bagi masyarakat Terban.
2. Memproduksi Air Mineral
   Kelurahan Terban juga membangun sistem pengairan air bersih yang langsung dikirim ke rumah-rumah masyarakat agar dapat dikonsumsi dan memenuhi kebutuhan. Selain itu, masyarakat Terban juga membangun aliran sungai agar berpotensi untuk mendukung pertanian warga. Hebatnya lagi, sumber mata air di Terban pun diolah dan dikelola masyarakat hingga menghasilkan produk air minum dalam kemasan yang dapat dijual untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.

Kesimpulan

Segudang inovasi yang ada di Kelurahan Terban, Kemantren Gondokusuman, Kota Yogyakarta telah berhasil mendapat juara 1 dalam Lomba Desa dan Kelurahan tingkat DIY. Sederet inovasi yang ada di Kelurahan Terban sangat bermanfaat dalam meningkatkan pelayanan serta memberikan kemudahan bagi masyarakat di kelurahan ini. Terlebih saat kasus Covid-19 sedang melonjak, Kelurahan Terban memiliki banyak inovasi, program-program untuk membantu warganya yang terdampak.

Inovasi-inovasi di Kelurahan Terban didukung dengan potensi yang ada pada setiap kampungnya baik produsen aneka cendera mata maupun kekayaan budaya yang terus dilestarikan masyarakatnya.

Daftar Pustaka

Portal Berita Kelurahan Terban. https://terbankel.jogjakota.go.id/page/index/gambaran-umum

Portal Berita Pemerintah Kota Yogyakarta. Diakses melalui https://warta.jogjakota.go.id/detail/index

Supriyanta, Oktiva Anggraini, REKAPITALISASI MODAL SOSIAL DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF BERBASIS TRIPLE HELIX DI YOGYAKARTA ERA NORMAL BARU, PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPERS FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS KRISTEN IMMANUEL: "Transformasi Indonesia 2021: Inovasi & Strategi Pemulihan Ekonomi Pascapandemi Covid-19". https://journal.ukrim.ac.id/index.php/PFE/article/view/289/222ISBN: 9 786239 861803 (Juni, 2021).

Suratiman. 2018. "Sejarah Budaya Terban". *Portal Berita Kelurahan Terban.* https://terbankel.jogjakota.go.id/detail/inex/31

PENGELOLAAN WISATA HALAL KAMPUNG KAUMAN YOGYAKARTA

Alif Aswan Prathama Putra, Ardilah Abdullah, Menaus Wasiangge, Urmila Putri Yanda, Nurul Safika Kasmin, Ramlya Ishak

1. Pariwisata Yogyakarta

Pariwisata sebagai salah satu penggerak di sektor ekonomi dapat menjadi solusi bagi pemerintah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi. Sektor pariwisata tidak hanya menyentuh kelompok-kelompok ekonomi tertentu, tetapi dapat menjangkau ekonomi kalangan bawah. Masyarakat yang berada di sekitar objek wisata dapat mendirikan berbagai kegiatan ekonomi, misalnya tempat penginapan, layanan jasa (transportasi dan informasi), warung, dan lain-lain. Dari kegiatan tersebut dapat menambah pendapatan masyarakat sehingga tingkat pengangguran dapat berkurang dan lebih sejahtera. Pengembangan pariwisata berbasis potensi wisata sejarah dan budaya merupakan salah satu alternatif bagi pengunjung untuk tujuan wisata. Suasana kehidupan budaya yang jauh dari kehidupan modern memberikan kesan yang berbeda bagi wisatawan.

Pengembangan wisata berbasis peninggalan sejarah sangat tepat dilakukan di wilayah Yogyakarta. Yogyakarta pernah mendapatkan gelar *The League of Historical City* dari UNESCO bersama-sama dengan 88 kota besar bersejarah seperti Kyoto, Paris, London, Boston, dan sebagainya. Oleh karena itu, upaya pemerintah untuk mengembangkan objek-objek wisata sejarah dan budaya di Kota Yogyakarta perlu mendapatkan dukungan. Terlebih dengan dikembangkannya potensi-potensi wisata yang ada di daerah tentu akan memberikan peningkatan pada kehidupan perekonomian masyarakat setempat.

Yogyakarta selain terkenal sebagai Kota Pelajar juga terkenal di Indonesia dan juga mancanegara dengan potensi wisata yang

dimiliki. Potensi-potensi baik berupa keindahan panorama alam maupun kebudayaannya. Banyak sekali objek wisata yang terkait dengan sejarah dan kebudayaan. Sebagai pusat kebudayaan Jawa, Yogyakarta sangat kaya peninggalan sejarah masa lalu baik dari zaman klasik atau masa pengaruh Hindu Budha maupun pengaruh dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Peninggalan dari zaman klasik tersebar di berbagai wilayah Yogyakarta, antara lain kompleks Candi Prambanan di Sleman maupun berbagai macam situs Hindu Buddha di wilayah Bantul, seperti situs Payak dan sebagainya.

Peninggalan dari masa Islam juga tidak kalah banyaknya, antara lain situs Kotagede, Keraton Yogyakarta, maupun Tamansari. Dengan adanya objek wisata sejarah ini tentu saja mempunyai dampak terhadap kehidupan masyarakat.

Sesuai dengan asas otonomi daerah yang berlaku, maka pengembangan pariwisata juga menjadi bagian dari proses pembangunan otonomi daerah. Banyaknya objek dan daya tarik wisata yang ada, diperlukan strategi pengelolaan pariwisata guna untuk meningkatkan pendapatan daerah di Yogyakarta. Setiap daerah itu memiliki wisata alam yang berbeda-beda mulai dari wisata sejarah, wisata budaya, wisata alam, wisata keagamaan, dan lainnya yang dapat dinikmati oleh khalayak umum. Pariwisata merupakan sektor yang dapat menunjang kemajuan suatu daerah. Dengan adanya strategi di bidang pariwisata daerah, hal tersebut dapat meningkatkan perekonomian daerah tersebut. Berangkat dari latar belakang di atas menarik untuk dikaji mengenai upaya *stakeholder* pariwisata mempromosikan destinasi wisata Halal Kampung Kauman Yogyakarta

2. Sekilas Destinasi Wisata Halal Kauman

Destinasi Wisata Halal Kauman adalah sebuah kampung yang terletak di Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Yogyakarta, di selatan Malioboro dan di utara Keraton Nyayogyakarta. Sebelah utara kampung ini dibatasi jalan K.H.A.Dahlan, sebelah selatan dibatasi oleh tembok benteng

Keraton Yogyakarta. Saat itu, seorang muslim bernama K.H.Ahmad Dahlan juga menyempurnakan kiblat sholat 24 derajat ke arah barat laut (arah mesjid al Haram di Mekkah) serta menghilangkan kebiasaan selamatan untuk orang meninggal.

Gapura yang bagian atasnya berbentuk lengkung akan menyambut sebelum memasuki Kauman. Bentuk lengkung itu merupakan salah satu ciri bangunan Islam yang banyak mendapatkan pengaruh dari timur tengah. Di bagian atas gapura, akan ditemui gambaran berbentuk lingkaran berwarna hijau dengan matahari bersinar 12 yang berwarna kuning di dalamnya. Gambaran tersebut sampai saat ini masih dipakai Muhammadiyah sebagai lambang organisasi sekaligus institusi lain yang bernaung di dalamnnya. Bangunan paling dikenal yang termasuk dalam kompleks Kampung Kauman adalah Masjid Agung. Masjid yang menjadi masjid pusat di wilayah kesultanan itu didirikan sejak 16 tahun setelah berdirinya Keraton Yogyakarta. Arsitektur masjid yang sepenuhnya bercorak Jawa dirancang oleh Tumenggung Wiryakusuma. Bangunan masjid terdiri atas inti, serambi, dan halaman yang keseluruhannya seluas 13.000 meter persegi. Bangunan serambi dibedakan dari bangunan inti. Tiang-tiang penyangga masjid misalnya, pada bangunan inti berbentuk bulat polos sebanyak 36 sedangkan pada bagian serambi tiangnya memiliki umpak batu bermotif awan sebanyak 24 buah.

Kalau sudah menjelajahi semuanya, wisatawan akan mengakui kehebatan warga kampung kecil ini dan memercayai bahwa Islam telah membawa perbaikan. Buktinya, sejumlah tokoh Islam Indonesia, seperti Abdurrahman Wahid dan Amien Rais pernah belajar di kampung ini. Kampung Kauman juga memiliki begitu banyak kegiatan dan keorganisasian, contoh kegiatan yang sering dilakukan adalah di setiap hari Sabtu dan Minggu selalu diadakan kerja bakti di lingkungan Kampung Kauman sendiri dan setiap bulannya, Kampung Kauman mengadakan lomba dan hal merawat tanaman. Di kampung Kauman sendiri terdapat keorganisasian, yaitu:

1. Kepemudaan Muhammadiyah yang diketuai oleh Bapak Tony dan wakilnya Almarhum Bpk Yamron, tetapi keorganisasian ini vakum untuk sementara waktu.
2. Dalam bidang olahraga (Tapak Suci), kegiatan ini bisa dikatakan kegiatan yang sangat diminati oleh para masyarakat Kauman terutama para pemuda pemudi. Yang melatih atau yang menjadi gurunya adalah Bpk Dr.Sujono Rakil Santoso dan didampingi oleh Bpk Bahri Hajis.

3. Permasalahan Wisata Halal KaumanYogyakarta

Indonesia merupakan sebuah negara dengan berbagai macam budaya dan kesenian yang sangat memesona mata dunia. Salah satu kota tujuan pariwisata di Indonesia adalah Kota Yogyakarta. Kota yang diidentikkan dengan kota yang penuh kenangan akan sejarah dan budaya ini senantiasa mengundang wisatawan tiap tahunnya. Baik dari wisatawan lokal maupun wisatawan asing.

Objek wisata yang ditawarkan Kota Yogyakarta ini banyak mendapat perhatian dan minat dari para pengunjung yang juga menimbulkan geliat dan gairah kehidupan masyarakat sekitarnya. Adanya para wisatawan dan minat usaha yang besar dari para pedagang akan memengaruhi perilaku sosial ekonomi yang tampak dari cara-cara dan aktivitas-aktivitas pedagang dalam kegiatan ekonomi mereka sebagai pedagang. Oleh karenanya, permasalahan yang muncul tidak dapat dimungkiri pasti akan terjadi.

Masalah yang akan dihadapi Kampung Kauman sendiri adalah jika terjadi wisatawan dari luar yang tidak mengetahui pagar budaya dari Kampung Kauman lalu dia mengubahnya dan menyebarluaskan kepada masyarakat atau pengunjung Wisata Halal Kauman dan yang paling ditakutkan adalah munculnya wisatawan asing dari luar negeri yang tidak mengetahui kebudayaan yang sudah dibangun sejak lama. Kampung Kauman sendiri sangat menjunjung tinggi budaya yang sudah dibangun sejak lama.

Kampung Kauman didirikan tepat bersaman dengan didirikan Masjid Besar Kauman. Kauman diambil dari kata pekauman yang

berarti tempat para kaum. Masjid besar Kauman didirikan oleh K.H.Ahmad Dahlan dan di dalam Kampung Kauman terdapat pula Musala Aisyiyah yang didirikan oleh istri dari K.H.Ahmad Dahlan, beliau membangun masjid itu untuk para kaum hawa, yaitu perempuan. Kampung Kauman terletak di kecamatan Gondomanan, Yogyakarta, di selatan Malioborodan di utara Kraton Ngayogyakarta dan di Kampung Kauman inilah tempat berdirinya gerakan Muhammadiyah.

Sasaran berdirinya Kampung Kauman adalah untuk menyatukan para ulama dan mempertemukan para kaum di Masjid Besar Kauman dan bertujuan untuk menyatukan kembali pagar kebudayaan Wisata Kauman. Di kampung Kauman terkenal sebagai kampung yang amat ramah kepada pendatang dan kebudayaan yang sangat melekat di lingkungan masyarakat setempat.

4. Peningkatan Strategi Pengelolaan Wisata Halal Kauman Yogyakarta

Strategi merupakan salah satu jenis perencanaan yang perlu dibuat oleh pemerintah daerah dalam rangka menentukan strategi yang efektif untuk digunakan dalam mengembangkan sektor pariwisata agar lebih bersifat komprehensif dalam arti lebih memfokuskan pada analisis lingkungan secara keseluruhan, baik lingkungan eksternal maupun lingkungan internal (Yoeti: 2008).

Peningkatan pariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan daerah. Pariwisata dikembangkan untuk berperan serta menjawab ataupun mengatasi berbagai permasalahan pembangunan yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, pertahanan, dan keamanan. Arah kebijakan umum ini kemudian dijadikan sebagai tuntunan utama bagi pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan dan penetapan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka mendorong proses pembangunan daerah secara keseluruhan.

Dalam rangka pengembangan wisata, diperlukan strategi pengembangan atau pengelolaan pariwisata untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Berikut ini beberapa strategi

yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Yogyakarta dalam pengelolaan Wisata Halal Kauman di Yogyakarta. Pertama, upaya strategi untuk meningkatkan kunjungan adalah dengan cara mempromosikan dan pemasaran objek dan daya tarik wisata daerah di Indonesia. Khususnya di Yogyakarta, dilakukan dengan jalan melakukan promosi kepariwisataan. Promosi dan pemasaran pariwisata merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dalam rangka menarik minat wisatawan untuk datang berkunjung ke suatu tempat wisata. Kegiatan promosi pariwisata merupakan usaha untuk memperkenalkan produk pariwisata, yakni segala sesuatu yang ditawarkan baik objek dan daya tarik wisata. Kesinambungan kegiatan promosi akan semakin menarik banyak wisatawan untuk datang berkunjung, menikmati produk pariwisata yang ditawarkan. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya bahwa kegiatan promosi yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata daerah Yogyakarta, antara lain adalah lewat festival, pameran di dalam daerah, dan lewat website dan media cetak.

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam industri pariwisata banyak memberikan manfaat bagi kegiatan promosi pariwisata. Penyediaan website dalam rangka promosi pariwisata oleh pemerintah daerah merupakan bagian dari penggunaan teknologi dan informasi yang dimanfaatkan guna pengembangan pariwisata itu sendiri. Oleh karena itu, untuk mempermudah industri pariwisata maka perlu diikuti dengan pengembangan suatu teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini berguna demi kelancaran promosi wisata, meningkatkan daya guna dalam pariwisata, memberikan berbagai jasa layanan kepada wisatawan dalam bentuk telematika, dan menjadikan penyelenggaraan pemasaran pariwisata lebih mudah diakses (Yoeti Oka, 2012).

5. Program Peningkatan Sumber Daya Pengelolaan Pariwisata

Kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia terhadap pariwisata yang profesional dan berkemampuan tinggi

dirasakan sampai saat ini, di mana *human resources* ini belum sesuai dengan apa yang diharapkan, yakni *the rightman and the right place*. Pelaku pariwisata sangat kurang jumlahnya dan kualitasnya tidak sesuai dengan sumber daya yang ada di dinas maupun di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan pengembangan kebudayaan dan pariwisata.

Sumber daya manusia diakui sebagai salah satu komponen vital dalam pengembangan pariwisata. Hampir setiap tahap dan elemen pariwisata memerlukan sumber daya manusia sangat menentukan eksistensi pariwisata. Sebagai salah satu industri jasa, sikap, dan kemampuan *staff* akan berdampak krusial terhadap bagaimana pelayanan pariwisata diberikan kepada wisatawan yang secara langsung akan berdampak pada kenyamanan, kepuasan, dan kegiatan wisata yang dilakukan. Peningkatan kapabilitas sumber daya manusia, baik di kalangan masyarakat setempat maupun di kalangan pemerintah daerah sendiri melalui pembinaan, penyuluhan, dan pendidikan kepariwisataan secara berkesinambungan. Yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan infrastruktur dalam pelayanan pariwisata karena mempunyai peran signifikan bagi jumlah pengunjung (Hanooum, 2015).

Gambar 1 Suasana Kegiatan Kampung Kauman Menggembirakan Memeriahkan Muktamar Muhammadiyah ke-48.
Sumber: Website Masjid Gedhe Kauman, 2022

Gambar 2 Suasana Takjil di Masjid Kauman
Sumber: https://mesjidgedhe.or.id/wp-content/uploads/2013/07/takjil1.jpg

6. **Solusi untuk Meningkatkan Pengunjung Wisata Halal Kauman Yogyakarta**.

Dari permasalahan yang ada di daerah Wisata Halal Kauman Yogyakarta adalah jumlah pengunjung yang ada mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Adapun Wisata Halal Kauman dapat meningkat pengunjungnya hanya di waktu-waktu khusus saja seperti masa liburan sekolah, masa lebaran, dan lainnya. Melihat permasalahan yang ada maka perlu adanya solusi peningkatan jumlah pengunjung yang dilakukan oleh semua pihak yang terkait. Diperlukan pula apresiasi dan partisipasi masyarakat agar kegiatan-kegiatan yang dilakukan dapat lebih mudah dilaksanakan.

Diharapkan pemerintah setempat mampu mengajak masyarakatnya berperan aktif dalam pengembangan Wisata Halal Kauman Yogyakarta. Dalam hal pengembangan apresiasi dan partisipasi masyarakat di daerah Kauman Yogyakarta cukup bagus melalui penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat setempat untuk mengajak masyarakat berpatisipasi dalam pengembangan Wisata Halal Kauman.

Dengan melibatkan partisipasi masyarakat, maka akan lebih terjamin kesesuaian program pengembangan dengan aspirasi masyarakat dan memberikan apresiasi kepada masyarakat yang terlibat dalam hal pariwisata agar masyarakat merasa dihargai. Kampung Kauman Yogyakarta perlu adanya inovasi baru sebagai daya tarik bagi pengunjung sehingga akan berdampak pada pendapatan ekonomi daerah. Tempat parkir di wisata daerah Kauman sendiri terlalu jauh sehingga masyarakat yang renta dan sudah lansia merasa sangat kesulitan maka dari itu harapannya agar tempat parkir tidak terlalu jauh dengan masjid besar Kauman itu sendiri.

Kesimpulan

Kampung Kauman dikenal sebagai kampung ramah terhadap pengunjung dan menjunjung tinggi keislaman yang menjadi patokannya. Masyarakat sekitar saling menghargai dalam kegiatan apapun di luar rumah maupun di dalam rumah. Wisata Halal

Kauman bernuansa keislaman dan mampu menyedot kunjungan wisatawan dari negeri sendiri maupun mancanegara. Pengenalan dan promosi wisata halal melalui pameran, kunjungan, dan media sosial. Promosi lain, dengan mengandalkan teknologi informasi. Selain murah, dapat menjangkau pangsa pasar lebih luas. Upaya berjejaring dengan media dan masyarakat hendaknya dapat lebih ditingkatkan agar destinasi wisata halal pulih kembali potensinya.

Daftar Pustaka

Admin. 2022. "Kegiatan Kampung Muhammadiyah Kauman dalam Menggembirakan Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan 'Aisyiah". *Masjid Gedhe Kauman*. https://mesjidgedhe.or.id/kegiatan-kampung-muhammadiyah-kauman-dalam-menggembirakan-muktamar-ke-48-muhammadiyah-dan-aisyiyah/.

Hanoum Wahadi, Woro. (2015*). Pengaruh Fasilitas Wisata dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pengunjung Di Taman Margasatwa Ragunan Jakarta. Manajemen Resort & Leissure*, Universitas Pendidikan Indonesia.

https://mesjidgedhe.or.id/wp-content/uploads/2013/07/takjil1.jpg

Yoeti, Oka. A. (2012). *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Edisi Revisi. Bandung: CV. Angkasa.

Yoeti, Oka.A. (2013). *Pemasaran Pariwisata*.Edisi Revisi. Bandung: CV. Angkasa.

NOSTALGIA TOUR DE KOTABARU DI YOGYAKARTA: UPAYA MENAMBAH KECINTAAN TERHADAP CAGAR BUDAYA

Intan Ayu Fitria, Roifatul Karomah, Agus Krepmbo,
Martina Lefumonay, Pramesti Amaliyah

A. Wisata Cagar Budaya Kotabaru

Sektor penting dalam meningkatkan perekonomian dan pembangunan nasional ialah sektor pariwisata. Berbagai upaya untuk mendongkrak destinasi wisata dalam inovasi-inovasi yang kreatif di bidang pariwisata menjadi topik yang sangat diperbincangkan dan terus-menerus dilakukan upayanya. Menyajikan wisata budaya dan sejarah dengan cagar budaya sebagai andalannya menjadi tantangan bagi *stakeholder* pariwisata. Mengingat cagar budaya memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Cagar budaya menjadi sumber kebanggaan tersendiri bangsa untuk masa depan penerus bangsa itu.

Bangunan bersejarah di kota yang termasuk cagar budaya memiliki cara kerja seperti lanskap memori (Halbwachs and Coser, 1992) yang berfungsi sebagai artefak juga memiliki hubungan rasional dengan orang di sekitarnya karena memiliki memori bersejarah dengan tempat tersebut. Ruang-ruang bersejarah tersebut merupakan identitas nasional dan lokal sebagai tempat memori dan nilai sosial serta magnet bagi ekonomi kreatif (Bandarin dan Ores, 2012). Sedemikian pentingnya arti cagar budaya sehingga penataan ulang kota di masa depan harus sesuai dengan warisan sejarah yang terdapat di kota tersebut guna merawat memori agar nilai historisnya tidak luntur tergerus kehidupan modern (Maxim and Chasovchim 2021).

Yogyakarta adalah salah satu daerah wisata yang berupaya menjaga cagar budaya dan warisan leluhur. Sejak dahulu, Yogyakarta sudah terkenal dengan sebutan Kota Budaya, sejarah, dan kota perjuangan. Salah satu kawasan yang menarik adalah kawasan Kotabaru. Kawasan destinasi wisata yang menjadi cagar

budaya ini sangat penting dan harus dijaga oleh generasi penerus bangsa dengan menanamkan rasa cinta tanah air Indonesia dan menjaga jati diri bangsa Indonesia agar tetap kokoh bersatu.

Potensi akan wisata cagar budaya di Kotabaru penting dilakukan untuk ilmu pengetahuan masa depan, ilmu sejarah dan peradaban, dan ilmu kebudayaan. Pemanfaatan untukkepentingan lokal dan kepentingan nasional sebagai tempat destinasi wisata budaya. Dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan yang mencakup destinasi wisata yang berbunyi "Penyelenggaraan kepariwisataan bertujuan:

''Memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan, dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata;

- memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antarbangsa;
- memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
- meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; dan
- mendorong pendayagunaan produksi nasional."

Dalam hal ini, pemerintah juga memiliki kewajiban untuk memajukan destinasi wisata dan menjaga kebudayaan bagi kesejahteraan masyarakat. Sebagai tempat-tempat wisata yang bersejarah dan kaya akan unsur budaya, penting untuk dilestarikan eksistensinya di masa depan. Dalam rangka mengenalkan destinasi tempat wisata di Kotabaru, Dinas Pariwisata (Dinpar) Kota Yogyakarta membuat langkah atau rangkaian kegiatan Tour de Kotabaru.

Kegiatan Tour de Kotabaru merupakan strategi untuk memulihkan dan membangkitkan kembali pariwisata di Yogyakarta. Sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia, destinasi wisata di Yogyakarta menurun dari segi jumlah wisata yang datang terhitung sedikit dan bahkan banyak tempat-tempat yang sepi karena ditutup saat lonjakan Covid-19. Industri pariwisata yang baru-baru ini

dikelola dalam rangka meningkatkan pembangunan, nasional, dan perekonomian di Kotabaru, Yogyakarta. Diharapkan dengan banyaknya wisatawan yang akan datang dapat memberikan dampak-dampak sosial yang positif bagi penduduk lokal di sekitar. Semakin banyak wisatawan yang tertarik untuk mengikuti kegiatan Tour De Kotabaru akan meningkatkan ekonomi pariwisata di Yogyakarta.

Potensi wisata di Kotabaru Yogyakarta dapat dilihat berdasarkan objek wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya, dan wisata religius, yaitu sebagai berikut.

Tabel 1 Jumlah Potensi Wisata di Kotabaru Berdasarkan Jenisnya

No	Jenis Objek Wisata	Jumlah
1	Wisata alam	28
2	Wisata sejarah	4
3	Wisata budaya	14
4	Wisata religius	2

Sumber: Dinpar Kota Yogyakarta 2021

Tampak pada tabel 1 bahwa wisata di kawasan Kotabaru beragam, meskipun sebagian besar didominasi wisata alam, disusul dengan wisata budaya, wisatawan dapat mengunjungi beragam wisata religius dan sejarah. Melalui tulisan ini, akan dikaji upaya pemerintah Kota Yogyakarta, dalam hal ini Dinas Pariwisata atau Dinpar Kota Yogyakarta memperkenalkan destinasi wisata baru yang ada di tengah kota, yakni rangkaian kegiatan Tour de Kotabaru.

B. Sejarah Kotabaru

Kotabaru merupakan sebuah kelurahan yang ada di Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta. Kawasan ini termasuk zona bersejarah dengan banyak peninggalan bangunan yang berarsitektur Eropa. Kotabaru juga ditetapkan sebagai kawasan *heritage* serta menjadi kawasan penopang keistimewaan DIY. Hal ini tercantum dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dahulu, kawasan Kotabaru adalah kawasan perumahan bagi orang Belanda yang dibangun pada akhir pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwana VII (1877-1921) atau setelah Perang Dunia 1. Kawasan ini dibangun terpisah dari Kota Yogyakarta yang lama.

Sejarah Kotabaru terbagi menjadi dua periode.

a. **Masa Sebelum Kemerdekaan Indonesia 1945**
   Sejarah perkembangan ini diawali pada masa Pemerintahan Belanda di Indonesia. Di mana dalam hal berlakunya politik pintu terbuka yang memberikan kesempatan bagi bangsa lain untuk melakukan penanaman modal internasional di wilayah jajahan Belanda, termasuk di Indonesia dan Yogyakarta.
b. **Masa Setelah Kemerdekaan Indonesia 1945**
   Di antaranya adalah pertempuran antara warga Yogyakarta dan sekitarnya (serbuan Kotabaru) 7 Oktober 1945. Serbuan ini merupakan salah satu akibat adanya proklamasi kemerdekaan Indonesia,di mana rakyat Indonesia melakukan perlawanan dan perebutan aset-aset penting di Yogyakarta.

Selanjutnya, Yogyakarta menjadi Ibu Kota Negara Indonesia untuk sementara waktu atas tawaran Hamengkubuwono IX. Terakhir, pembangunan Masjid Syuhada yang menjadikan momen penting di Kotabaru pascakemerdekaan. Wilayah Kotabaru di sebelah utara dahulunya adalah kawasan bangunan Kolonial Hindia-Belanda.

C. Kawasan Cagar Budaya Kotabaru

Masyarakat Eropa pada awalnya bermukim di sekitar Loji Kecil (Benteng Vredeburg). Populasi orang Eropa meningkat seiring dengan aktivitas perekonomian, terutama setelah berkembangnya perkebunan tebu dan pabrik gula. Sampai akhirnya memutuskan untuk memperluas wilayah permukiman Eropa ke arah utara. Residen Yogyakarta saat itu Cornelis Cane

meminta izin kepada Sultan Hamengkubuwono VII untuk membangun kawasan permukiman baru bagi orang Eropa. Pada abad 20 dilakukan perluasan dengan keluarnya Rijksblad Sultan Jogjakarta No. 12, 1917 yang berisi izin pembangunan Kawasan Kotabaru (Nieuwe Wijk) di sebelah timur Kali Code. Batas wilayah kawasan Kotabaru, meliputi:

a. batas sisi utara : Jl Jendral Sudirman;
b. batas sisi selatan : rel kereta api – stasiun Lempuyangan;
c. batas sisi timur : Jl. dr. Wahidin Sudirohusodo; dan
d. batas sisi barat : Sungai Code.

Gambar 1 Peta Kawasan Kotabaru

Terdapat usaha yang telah dilakukan untuk melindungi kawasan Kotabaru dengan Perda DIY No 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya. Isi dari perda tersebut adalah bahwa panduan arsitektur bangunan baru pada kawasan Cagar Budaya Kotabaru ditetapkan memakai gaya arsitektur Indis dan Kolonial. Dengan harapan tetap terjaga kelestariannya baik lingkup kawasan maupun lingkup bangunan.

Menurut Undang-Undang RI No.11 Tahun 2010 pada pasal 1 ayat 6 menjelaskan tentang Cagar Budaya, yaitu yang berbunyi "Kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya

berdekatan atau dan memperlihatkan ciri tata ruang yang khas", maka diperlukan strategi untuk melestarikan kawasan di Kotabaru karena saat ini, kerusakan terhadap bangunan- bangunan yang menjadi kawasan cagar budaya Kotabaru.

D. Paket Wisata Tour De Kotabaru

Tour yang pertama, wisatawan akan dimanjakan dengan trek wisata di malam hari terkhusus pada para pencinta olahraga lari. Kegiatan *tour* ini dijelaskan oleh Bapak Wahyu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, akan menjadi kegiatan Alternatif *Sport Tourism* di Jogja. Pelari malam yang mengikuti kegiatan Kotabaru *Night Run* terdiri sekitar 40-an orang yang berasal dari daerah dan komunitas-komunitas berbeda di Kota Yogyakarta. Peserta yang ikut merupakan orang-orang yang sering melakukan *Night Run* di saat sebelum pandemi Covid-19 melanda. Kotabaru *Night Run* diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta untuk memudahkan wisatawan dalam mengakses paket wisata dengan melihat berbagai aktivitas atau kegiatan lari malam di Kotabaru. Para koordinator melakukan musyawarah dengan kompak untuk menentukan rute-rute yang akan dilalui. Rute yang dilalui Kotabaru *Night Run* yaitu dari Kantor Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta---Jalan Jendral Sudirman---Tugu Pal Putih---Jalan Margo Utama---Jalan Abu Bakar Ali---Masjid Syuhada--- Favehotel Malioboro Yogyakarta.

Menurut Bapak Wahyu Hendratmoko, Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Kota Baru akan dikembangkan menjadi kawasan yang didesain untuk menyeimbangkan kawasan destinasi wisata karena pusat keramaian di Yogyakarta yang selama ini diketahui oleh wisatawan lokal maupun wisatawan luar negeri hanya di Malioboro. Oleh karena itu, dampak yang terjadi mengenai pusat Malioboro menyebabkan kemacetan dan hal-hal lain yang ditanggung di kawasan Malioboro. Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta diarahkan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta untuk mewujudkan destinasi wisata baru.

Kotabaru di Yogyakarta itu berbeda dengan kota-kota di Yogyakarta lainnya seperti Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo, dan Sleman yang memiliki banyak sekali destinasi wisata alam yang sangat indah. Untuk membuat wisatawan dan masyarakat sadar akan potensi yang dimiliki Kotabaru walaupun hanya sedikit dan sejengkal Dinas Pariwisata Kota menjadikan daya tarik Yogyakarta wisata tersendiri, yakni wisata kunjungan kuliner yang ada di Kotabaru. Dalam rangkaian Paket wisata *tour* kuliner di Kotabaru memiliki sekitar 27 titik untuk dikunjungi, yaitu:

1. Rumah Gondokusuman (*RicheeseFactory),*
2. Mc Donald's Sudirman,
3. The House of Raminten,
4. De Celine Instagramable Restourant,
5. Kalluna,
6. Mie Gacoan Kotabaru,
7. Yamie Panda Chapter Kotabaru,
8. ROUX Kitchen & Bar,
9. Raminten Kitchen,
10. Silol Kopi & Eatery,
11. Nasi Goreng Padmanaba,
12. Siomay Telkom Kotabaru,
13. ROEMI Xtraordinary Ice Cream,
14. Sate Ayam Cak Amat,
15. Gyu Kaku Japanese BBQ,
16. Legend of Coffe,
17. Kue Bandung dan Pukis Ko Ayung,
18. Taman Kuliner Kotabaru,
19. Mister Burger Corporation,
20. Bubur Hayam Kotabaru,
21. Kopi janji jiwa jilid 103 Kotabaru,
22. Jeeva Yogyakarta,
23. Satu Lokasi Coffe & Store,
24. Jnawi Coffe,
25. Sendok Bebek Jogja,

26. Dimsum Sembilan Naga – Jogja, dan
27. Bakpia Juwara Satoe.

Tour yang ketiga adalah Tour de Estetika Kotabaru. Terdapat 11 titik perawatan kulit dan wajah yang diyakini mampu menarik minat pengunjung. *Tour* selanjutnya yakni Tour de Belanja Kotabaru. Terdapat tempat-tempat belanja yang cukup besar dan luas yang dapat dikunjungi wisatawan lokal maupun wisatawan dari mancanegara. Ada 15 titik yang akan dikunjungi wisatawan atau masyarakat dalam rangkaian Tour de Belanja Kotabaru. Dari tempat penjualan buku hingga tempat penjualan baju. *Tour* kelima atau terakhir adalah Tour de Budaya dan sejarah Kotabaru. *Tour* yang terakhir ialah mengunjungi tempat-tempat bersejarah yang memiliki unsur budaya. Dengan mengunjungi Museum Sandi, Masjid Syuhada, Gereja HKBP Yogyakarta, Monumen Serbuan Kotabaru, dan lain-lain.

Gambar 2 Toko Buku Gramedia

Gambar 3: Gereja Kotabaru

Gambar 4: Museum Sandi

Kesimpulan

Kotabaru tengah dikembangkan menjadi kawasan yang didesain menyeimbangkan kawasan destinasi wisata karena pusat keramaian yang terkenal di Yogyakarta di mata wisatawan hanya di Malioboro. Ada 15 titik yang dapat dikunjungi wisatawan atau

masyarakat dalam rangkaian Tour de Kotabaru. Daya tarik destinasi wisata Kotabaru dikenalkan dengan berbagai acara *gowes*, *night run* dan promosi media sosial. Inovasi Dinas Pariwisata Yogyakarta cukup berhasil memadukan potensi wisata sejarah, religi, wisata alam, dan wisata budaya yang mampu menjadi *multiflyer* efek, pendongkrak perekonomian warga. Tujuan lain yang tidak kalah pentingnya adalah memupuk kecintaan terhadap warisan bangsa dan negara karena upaya ini diiringi dengan menjaga kelestarian bangunan-bangunan Hindia Belanda yang bersejarah.

Daftar Pustaka

Bandarin, Francesco, & ers, Ron van. (2012). *The Historic Urban Landscape: Managing Heritage in an Urban Century*.West Sussex: John Wiley & Sons.

Halbwachs, Maurice, and Lewis A. Coser. (1992). *On Collective Memory*. Chicago, Ill: University of Chicago Press.

Maxim, Cristina, and Carmen Emilia Chasovschi. (2021_. "Cultural Landscape Changes in The Built Environment At World Heritage Sites: Lessons From Bukovina, Romania." *Journal of Destination Marketing & Management* 20:100583.

Peraturan:

Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan.

Rijksblad Sultan Jogjakarta No. 12 Tahun 1917.

Perda DIY no. 16 Tahun 2021.

UU No. 11 Tahun 2010.

RUMAH KOMPOS: MODEL PENGELOLAAN SAMPAH BERKELANJUTAN DI YOGYAKARTA

Fransiskus Dicaprio Saptro, Aldy Irawan, Amirudin Abdulla, Fikram Ilyas Mahing, Arifal Mansur

A. Sampah

Sampah merupakan masalah yang sangat rumit dan sedang dialami oleh berbagai negara di belahan dunia hal ini karena sifat sampah yang tidak bisa diurai, melainkan hanya bisa didaur ulang. Setiap negara memiliki jumlah sampah yang dihasilkan setiap tahun tergantung dengan penggunaan masyarakatnya. Terutama negara yang digolongkan sebagai negara maju dengan teknologi industrinya, banyak sampah yang dihasilkan baik itu dari limbah pabrik maupun limbah yang dihasilkan masyarakatnya. Hanya beberapa negara berkembang dengan total penghasil sampah terbesar salah satunya adalah Indonesia.

Di kawasan ASEAN sendiri Indonesia salah satu negara berkembang yang sedang mengalami penumpukan sampah. Hal ini selaras karena Indonesia dengan populasi penduduk terbanyak keempat dunia dan pertama di kawasan ASEAN sehingga sampah rumah tangga setiap tahun meningkat. Ditambah lagi industri yang sekarang sudah banyak memenuhi Indonesia, sampah yang dihasilkan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), jumlah sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Indonesia sebesar 21,88 juta ton pada tahun 2021 jumlah ini mengalami penurunan 33,33% dari tahun sebelumnya yang jumlahnya sebesar 32,82 juta ton (SIPSN. (2021).

Pengolahan sampah rumah tangga, dianjurkan pemerintah memperdulikan lingkungan dan kesehatan manusia. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah (UU. No 18, 2018). Tentang pengelolaan sampah di antaranya mengatur, penanganan sampah dengan

pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir dan menggunakan metode 4R. Sejumlah riset, di antaranya Alfitri (2018) menandaskan pentingnya menggencarkan penyuluhan pengelolaan sampah agar masalah rumah tangga dapat terurai dengan baik. Penyuluhan sampah menurut Sriagustini (2022) dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang dampak pengolahan akhir dengan cara dibakar dan cara pengolahan yang benar sebesar 60-70%. Faktanya, di beberapa daerah sekalipun penyuluhan digencarkan, perilaku masyarakat masih kurang peduli dan sampah rumah tangga masih perlu penanganan serius.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang mengalami masalah serius tentang penanganan sampah terutama soal masalah sampah rumah tangga. Hal ini menjadi perhatian khusus pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk mengurangi kepadatan sampah di TPA, Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mencanangkan pengelolaan sampah melalui pengomposan.

Kesalahan mengelola sampah selama ini datang dari fokus pemerintah dan masyarakat yang tidak memperhatikan cara mengelola sampah yang seharusnya dilakukan mulai sampah itu dihasilkan hingga sampah itu sampai ke tangan konsumen. Indonesia telah menerapkan aturan aturan yang sangat ketat dalam mengatasi masalah sampah. Namun, terdapat 3 hal yang masih belum diperhatikan oleh pemerintah, yaitu sebagai berikut. Pertama, memastikan pengurangan sampah dari sumbernya. Dalam penerapannya pemerintah harus memperhatikan betul perusahaan yang menghasilkan produksi yang dapat menimbulkan penumpukan sampah. Untuk itu, perusahaan harus membuat kemasan yang bisa didaur ulang atau mendesain kemasan yang semula hanya sekali pakai menjadi isi ulang. Penggunaan bahan-bahan berbahaya juga perlu dilarang keras demi memperhatikan kesehatan masyarakat dan merusak konsep *circular economy.* Kedua, menghapus Teknologi Thermal. Pemerintah perlu memperhatikan cara mengelola sampah dengan melakukan pembakaran (*Waste to energi, pyolysis, incinerator, psel, dan rdf)*

dan menggantikannya dengan proses yang ramah lingkungan. Ketika dilakukan pembakaran maka akan berakibat pada efek gas rumah kaca dan menghasilkan gas yang beracun sehingga dapat mengganggu lingkungan. Ketiga, mengidentifikasikan pengomposan. Hal ini merupakan salah satu yang paling efektif dalam pengurangan sampah yang menumpuk, yaitu dengan pengomposan. Pengomposan sendiri dilakukan oleh pemerintah dengan menyediakan tempat untuk dibangun bangunan guna melakukan proses pembuatan kompos. Banyak TPA seluruh kabupaten yang ada di Indonesia yang masih menggunakan sistem terbuka (*open dumping*) hal ini dapat memicu pelepasan gas metana yang dihasilkan dari penumpukan sampah di TPA. Dengan sistem pengomposan yang tertutup tentunya dapat diharapkan mengurangi pelepasan gas metana ke alam terbuka. Dengan menerapkan tiga cara di atas bukan tidak mungkin pemerintah bisa mengurangi perkembangan sampah yang semakin meningkat.

Artikel ini menjelaskan proses terbentuknya TPS3R Nitikan yang menjadi suatu lab percobaan pengelolaan sampah dan bagaimana proses pembuatan kompos, yang semula dari sampah organik menjadi kompos siap edar. Manfaat dan tujuan dari artikel ini memberikan gambaran kepada masyarakat terutama mahasiswa tentang cara pengelolaan sampah sehingga menjadi pembelajaran buat semua bahwa sampah hanya bisa diuraikan menjadi bahan baku yang siap dipakai. Dalam mengumpulkan data demi menunjang penulisan artikel ini penulis menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

B. Sejarah Terbentuknya TPS3R Nitikan

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang mengalami masalah serius tentang penanganan sampah terutama soal masalah sampah rumah tangga. Hal ini menjadi perhatian khusus pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk mengurangi kepadatan sampah di TPA Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup

(DLH) mencanangkan pengelolaan sampah melalui pengomposan. Jadi, dibentuklah TPS3R Nitikan yang dimulai sejak tahun 1994 melalui pembangunan rumah kompos untuk mengelola sampah organik. TPS3R Nitikan berlokasi di Kampung Nitikan RT 43, RW 11, Kelurahan Sorosutan, Kemantren Umbulharjo. Kegiatan yang dilakukan di TPS3R Nitikan berdasarkan pada prinsip (*Reduce, Reuse*, dan *Recycle*).

Pemerintah Kota Yogjakarta menjadikan TPS3R Nitikan sebagai proyek percontohan mengelolah sampah oleh masyarakat, tetapi pengelolaan sampah ini sementara hanya melibatkan masyarakat setempat dulu. TPS3R Nitikan terus mengalami perkembangan hingga saat ini mampu mengelola sampah organik skala kota melalui pembuatan kompos, pupuk cair, eco enzim, hingga budidaya maggot. TPS3R Nitikan juga melakukan pemilahan sampah yang berasal dari sampah rumah tangga wilayah sekitar.

C. Jumlah Sampah yang Diangkut ke TPS Piyungan

TPS Piyungan menjadi tempat pembuangan akhir sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Kota Yogyakarta, Sleman, dan Bantul. Volume yang banyak mengakibatkan saat pembuangan terjadi penumpukan di TPS Piyungan tersebut. Berikut data rekapitulasi sampah yang dibuang ke TPS Piyungan selama empat tahun belakangan ini.

Tabel 1
Rekapitulasi Sampah Terangkut ke TPA Piyungan Tahun 2018

No	Bulan	Ton/Bulan	Ton/Hari
1	Januari	9.103	303,43
2	Februari	8.151	271,70
3	Maret	8.735	291,17
4	April	8.055	268,50
5	Mei	7.997	266,57
6	Juni	6.874	229,13
7	Juli	6.882	229,40
8	Agustus	6.871	229,03
9	September	7.435	247,83
10	Oktober	7.778	259,27
11	November	8.586	286,20
12	Desember	4.880	162,67
Jumlah		91.347,10	3.044,90
Rata rata		7.612,26	253,74

Sumber: Data Sekunder TPS3R Nitikan, 2021

Tabel 2
Rekapitulasi Sampah Terangkut ke TPA Piyungan Tahun 2019

No	Bulan	Ton/Bulan	Ton/hari
1	Januari	8.515,67	274,70
2	Februari	7.939,62	283,56
3	Maret	8.066,92	260,22
4	April	8.782,96	292,77
5	Mei	8.219,79	265,15
6	Juni	7.335,14	244,50
7	Juli	8.120,07	261,94
8	Agustus	7.845,12	253,07

9	September	6.951,31	231,71
10	Oktober	8.496,75	274,09
11	November	8.707,77	290,26
12	Desember	9.392,45	302,98
TOTAL		98.373,57	3.234,95
Rata-Rata		8.197,80	269,58

Sumber: Data Sekunder TPS3R Nitikan, 2020

Tabel 3
Rekapitulasi Sampah Terangkut ke TPA Piyungan Tahun 2020

No	Bulan	Ton/Bulan	Ton/hari
1	Januari	9.642,78	311,06
2	Februari	8.768,64	302,37
3	Maret	10.519,90	339,35
4	April	7.126,99	237,57
5	Mei	7.465,74	240,83
6	Juni	7.279,49	242,65
7	Juli	6.541,49	211,02
8	Agustus	7.183,65	231,73
9	September	6.962,12	232,07
10	Oktober	7.759,61	250,31
11	November	8.432,36	281,08
12	Desember	8.301,79	267,80
Total		95.984,56	3.147,83
Rata-Rata		7.998,71	262,32

Sumber: Data Sekunder TPS3R Nitikan, 2021

Tabel 4
Rekapitulasi Sampah Terangkut ke TPA Piyungan Tahun 2021

No	Bulan	Ton/Bulan	Ton/hari
1	Januari	7.948,01	256,39
2	Februari	7.304,40	260,87
3	Maret	7.632,52	246,21
4	April	7.500,11	250,00
5	Mei	7.259,27	234,17
6	Juni	7.473,38	249,11
7	Juli	6.887,92	222,19
8	Agustus	7.059,16	227,71
9	September	6.980,62	232,69
10	Oktober	7.641,16	246,49
11	November	8.497,88	283,26
12	Desember	8.639,30	278,69
Total		90.823,72	2.987,79
Rata-Rata		7.568,64	248,98

Sumber: Data Sekunder TPS3R Nitikan, 2021

D. Proses Pembuatan Kompos

Dalam pembuatan kompos tentunya memiliki tahapan maupun proses yang sangat panjang sehingga nantinya akan menjadi kompos yang siap didistribusikan kepada masyarakat untuk memupuk tanaman. Proses pengomposan di TPS3R Nitikan dilakukan dengan menggunakan metode Bokhasi. Metode ini tidak memerlukan proses pembalikan dan waktu yang diperlukan untuk pengomposan sekitar 1-2 bulan. Metode Bokhasi itu sendiri adalah sebuah metode pengomposan yang dapat menggunakan starter aeorobik maupun anaerobik untuk mengomposkan bahan organik yang biasa berupa campuran molases, air, starter mikroorganisme, dan sekam padi. Gula pasir dan SOT dicampur ke dalam air

kemudian dibiarkan minimal 20 menit. Jenis sampah yang digunakan untuk bahan baku kompos adalah daun dan ranting yang berasal dari rampasan pohon perindang ataupun taman kota, serta sampah daun dari masyarakat Kota Yogyakarta. Setiap kompos perlu dilakukan pengayakan agar mendapatkan kompos yang halus dan terpisah ranting ranting kayu kecil. Selain pembuatan kompos terdapat juga pembuatan pupuk cair *dan eco enzyme. Eco-Enzyme* adalah cairan yang merupakan hasil fermentasi dari gula, sisa buah/sayuran, dan air. Berikut gambaran pengelolaan kompos.

Gambar.1

Selain tempat pembuatan kompos TPS3R Nitikan juga melakukan budidaya Lalat Hitam/Black Soldier Fly (BSF). Adanya budidaya lalat ini tentunya membantu dalam mengurai sampah dan berdampak pada pengurangan sampah dan juga memiliki nilai ekonomis bagi pengelola. Lalat hitam adalah salah satu jenis lalat yang dapat dimanfaatkan untuk mengurai sampah organik. Fase hidup BSF saat berupa larva (biasa disebut maggot) memerlukan makanan berupa sisa makanan dan buah buahan sebelum menuju siklus selanjutnya.

Biaya untuk mengelola sampah menjadi kompos meliputi biaya operasional, yaitu gaji tenaga kerja, BPJS, belanja bahan kimia, BBM, oli, dan menggantian suku cadang kurang lebih mengeluarkan biaya sebesar Rp886.740.940/tahun. Dengan biaya yang begitu besar diharapkan pemerintah Kota Yogyakarta dapat mengatasi dan mengurangi sampah yang menumpuk di TPA Piyungan.

E. Produksi Kompos Tiga Tahun Terakhir

Berdasarkan data yang didapat dari DLH Kota Yogyakarta yang dihimpun berdasarkan produksi kompos tiga tahun terakhir sebagai berikut.

Tabel 5

1) **Rekap Data Kompos TPS3R Kota Yogyakarta Tahun 2019**

No	Bulan	Jumlah Karung	Berat Karung (Kg)	Total (Kg)
1	Januari	228	30	6.840
2	Februari	290	30	8.700
3	Maret	365	30	10.950
4	April	130	30	3.900
5	Mei	121	30	3.630
6	Juni	280	30	8.400
7	Juli	300	30	9.000
8	Agustus	494	30	14.820
9	September	288	30	8.640
10	Oktober	375	30	11.250
11	November	276	30	8.280
12	Desember	226	30	6.780
TOTAL		**3373**	**30**	**101.190**

Sumber: Data Sekunder TPS3R Nitikan

Tabel 6

2) **Rekap Data Produksi Kompos Kota Yogyakarta Tahun 2020**

No	Bulan	Jumlah Karung	Berat Karung (kg)	Total (kg)
1	Januari	395	30	11.850
2	Februari	300	30	9.000
3	Maret	213	30	6.390
4	April	216	30	6.480
5	Mei	252	30	7.560
6	Juni	200	30	6.000
7	Juli	646	30	19.380
8	Agustus	690	30	20.700
9	September	551	30	16.530
10	Oktober	741	30	22.230
11	November	400	30	12.000
12	Desember	310	30	9.300
TOTAL				**147.420**
Rata-Rata/Bulan				**12.285**

Sumber: Data Sekunder TPS3R Nitikan

Tabel 7

3) **Rekap Data Produksi Kompos Kota Yogyakarta Tahun 2021**

No	Bulan	Jumlah Karung	Berat Karung (kg)	Total (kg)
1	Januari	335	30	10.050
2	Februari	327	30	9.810
3	Maret	420	30	12.600
4	April	245	30	7.350
5	Mei	200	30	6.000
6	Juni	297	30	8.910
7	Juli	219	30	6.570
8	Agustus	210	30	6.300
9	September	247	30	7.410
10	Oktober	489	30	14.670
11	November	214	30	6.420
12	Desember	271	30	8.130
TOTAL				**104.220**
RATA-RATA: Kg/Bulan				**8.685**

Sumber: Data Sekunder TPS3R Nitikan.

Keterangan: dari data di atas tampak jumlah produksi kompos paling banyak terjadi pada tahun 2020.

F. Dampak Rumah Kompos Bagi Masyarakat Yogyakarta

Dengan adanya rumah kompos, maka dihasilkan produk kompos yang diberikan secara gratis dapat membantu masyarakat di Kota Yogyakarta untuk bisa melakukan penghijauan di rumah masing-masing, dengan penanaman sayur dan buah di rumah masing-masing yang selanjutnya dapat dikonsumsi masyarakat sehingga menghemat biaya keperluan konsumsi harian. Kompos juga mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap penggunaan pupuk pestisida yang sewaktu waktu dapat merusak ekosistem. Bagi pemerintah dengan adanya rumah kompos tersebut tentunya pengolahan kompos dapat mengurangi timbunan sampah yang dibuang ke TPA Piyungan. Selain itu, dengan mengolah sampah

organik menjadi kompos dapat bermanfaat untuk menyuburkan tanah, perkembangan tanaman, dan mendukung kegiatan penghijauan di masyarakat. Berikut gambar perbandingan percobaan penggunaan kompos Nitikan dengan kompos lain pada tanaman cabai.

Gambar 2

Keterangan: gambar yang kanan kompos nitikan dan yang kiri kompos biasa.

Selain itu, sampah organik berupa daun dari warga Kota Yogyakarta (biasanya dari kegiatan kerja bakti/ penebangan pohon kampung-kampung) juga dimanfaatkan dijadikan bahan baku pembuatan kompos. Ada juga beberapa kendala yang dijumpai dalam pengelolaan Rumah Kompos Nitikan terkait dengan bahan baku dan mesin. Jumlah sampah daun yang masuk ke Rumah Kompos yang tidak tentu (fluktuatif) sehingga sering terjadi penumpukan di area perencekan. Bahan baku yang terlalu banyak rantingnya juga menyebabkan kompos waktu pelapukan kompos menjadi lebih lama. Selain mesin-mesin pengolahan kompos perlu pemeliharaan rutin agar pisau tetap tajam (tidak aus).

Hampir setiap hari ada masyarakat yang mengajukan permohonan bantuan kompos. Kompos hasil produksi Rumah Kompos diberikan secara gratis kepada masyarakat dengan mengajukan surat permohonan kompos ke Kepala DLH Kota Yogyakarta. Surat tersebut diajukan oleh kelompok masyarakat seperti bank sampah, kelompok tani, RT, RW, dan lainnya (bukan perseorangan), serta merupakan warga/masyarakat yang berkegiatan di wilayah Kota Yogyakarta. Kapasitas bak

pengomposan sudah ditingkatkan, sebelumnya pada tahun 2018 jumlah bak sampah di Rumah Kompos sebanyak 16 unit (bak), sejak 2019 ditambah dua kali lipat menjadi 32 unit (bak). Proses pembuatan kompos yang begitu lama tentunya memakan waktu hingga 1-2 bulan produksi. Kompos yang dihasilkan di Nitikan dapat merangsang pertumbuhan bunga dan buah, serta lebih kuat terhadap serangan hama tanaman. Tanaman yang menggunakan kompos Nitikan menjadi lebih baik dan tumbuh subur. Namun, tanaman yang menggunakan kompos lain mengalami pertumbuhan yang lambat serta mudah diserang hama tanaman.

Kompos juga sangat membantu masyarakat dalam hal kegunaan dan sangat terjangkau harganya sehingga masyarakat tidak perlu menggunakan pupuk pestisida yang dapat merusak lingkungan. Adanya Rumah Kompos Nitikan Yogyakarta masyarakat tidak perlu lagi takut soal masalah sampah. Masalah sampah sudah ditangani oleh pemerintah dengan mendirikan rumah kompos. Perlu juga kesadaran dari masyarakat agar tidak mudah membuang sampah sembarangan, melainkan membuangnya pada tempat yang disediakan sehingga memudahkan petugas dalam mengumpulkan.

Selain mengurangi volume sampah di Kota Yogyakarta adanya pengelolaan sampah ini tentunya dapat berpengaruh terhadap penghijauan lingkungan serta penerapan inovasi yang terbarukan. Pengurangan terhadap pelepasan gas metana ke alam terbuka yang dihasilkan oleh sampah juga dapat mengakibatkan efek buruk, terutama terhadap kesehatan hidup.

Kesimpulan

Rumah kompos Nitikan merupakan tempat produksi/pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta yang berdomisili di Kampung Nitikan. Selain mengelola sampah menjadi pupuk, terdapat pembudidayaan maggot yang dikembangkan untuk meningkatkan nilai ekonomis, masyarakat bisa memesan maggot untuk dijadikan pakan ikan. Rumah Kompos juga selalu mendata setiap kompos yang dihasilkan serta

didistribusikan kepada masyarakat. Masyarakat juga sangat mendukung adanya Rumah Kompos di Kampung Nitikan. Hal tersebut dibuktikan dengan antusiasme masyarakat mengajukan permohonan kompos ke DLH Kota Yogyakarta. Dengan demikian, langkah pengelolaan sampah terpadu semi berbasis masyarakat ini dapat menjadi inspirasi daerah lain yang kesulitan dalam penanganan sampah rumah tangga.

Daftar Pustaka

Alfikri, N., Hidayat, W., & Girsang, V. I. (2018). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Tindakan Membuang Sampah di Lingkungan IV Kelurahan Helvetia Kecamatan Medan Helvetia Tahun 2017. *Jurnal Riset Hesti Medan Akper Kesdam* I/BB Medan, 3(1), 10–20.

Pemerintah Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah. In Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

SIPSN. (2021). Timbulan Sampah. Https://Sipsn.Menlhk.Go.Id/.

Sriagustini, Isyeu, Nurazijah, EDUKASI PENGOLAHAN SAMPAH RUMAH TANGGA SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA LINGKUNGAN, *JIRAH Jurnal Pengabdian Masyarakat Kesehatan* Vol. 01, No. 01, Bulan April, 2022.

Sumber lain:

Data Pengelolaan sampah TPS3R Nitikan, 2020.

Data Pengelolaan sampah TPS3R Nitikan, 2021

	Gambar 1: Mesin Penghalus kompos
	Gambar 2: Lalat Maggot
	Gambar 3: Kompos Hasil Pencacahan
	Gambar 4: Hasil Kompos Yang sudah dikemas
	Gambar 5: Foto Bersama